

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

LVII/NOVEMBER - 2021

- 09** | Mengetahui SIPLah, Sistem Pengadaan Transparan dan Akuntabel serta Berkelanjutan
- 12** | Fokus pada Tujuan dan Prinsip, Pelaku, Tata Cara, dan Dokumen yang Sederhana
- 15** | Perbedaan Tahapan PBJ dengan Nilai di Bawah Rp10 Juta hingga di Atas Rp200 Juta

**AMAN
BERBELANJA
BERSAMA
SIPLah**

**MERDEKA
BELAJAR**



DAFTAR ISI

04 Salam Mas Menteri

06 Sekilas Kemendikbudristek

FOKUS

- 09** Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Mengenal SIPLah, Sistem Pengadaan Transparan dan Akuntabel serta Berkelanjutan
- 15** Klasifikasi Tahapan Berdasarkan Nominal
Perbedaan Tahapan PBJ dengan Nilai di Bawah Rp10 Juta hingga di Atas Rp200 Juta
- 18** Proses Bisnis SIPLah
Alur Kerja dari Kemendikbudristek Hingga Dapat Digunakan oleh Penyedia dan Satuan Pendidikan
- 22** Peta Jalan SIPLah
Dari Inisiasi Hingga Integrasi dan Sinergi
- 24** Capaian SIPLah
Beragam Penghargaan dan Rencana ke Depan
- 26** Praktik Baik Stop Perundungan dan Intoleransi:
Belajar dari Program Buddy dan Pohon Kerukunan Pastikan Anak Aman dan Nyaman Belajar

28 OPINI
Ir. Eddy Satriya M.A
Program SIPLah Mendorong UMKM Meningkatkan Kualitas Usaha

30 RESENSI
Merdeka Belajar dalam Pendekatan Humanis

32 SEPUTAR DUNIA PERFILMAN INDONESIA
Film Bumi Manusia
Pentingnya Literasi dalam Menjalani Kehidupan di Lingkungan yang Beragam

35 KEBUDAYAAN
Festival Musik Tradisi Indonesia (FM TI) 2021
Perkuat Ekosistem Musik Tradisi dan Regenerasi Pelestari Budaya

38 KAJIAN
Gelombang Inovasi di Kampus Perjuangan Melawan Covid-19
Mencegah Penularan Hingga Deteksi Awal Melalui Keringat di Ketiak

39 KAJIAN
BOP PAUD
Meringankan Biaya untuk Layanan PAUD Lebih Bermutu

41 BANGGA BERBAHASA INDONESIA
Semarak Bulan Bahasa dan Sastra 2021

42 BANGGA BERBAHASA INDONESIA
Kata Baku dan Tidak Baku



SAPA REDAKSI

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi bagian yang tak terlepaskan dari operasional satuan pendidikan. Proses PBJ yang aman, mudah, murah, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi sekolah. Menjawab kebutuhan tersebut, Kemendikbudristek menghadirkan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).

Sejak dirancang pada tahun 2018, SIPLah telah bertransformasi dari sekadar wadah untuk mempertemukan penjual dan pembeli, menjadi sistem yang mampu memberi rasa aman bagi penggunanya. SIPLah kini memiliki fitur mengelola transaksi menjadi laporan pertanggungjawaban yang sah menurut peraturan yang berlaku. Lalu bagaimana SIPLah dirancang hingga capaian yang sudah diraih hingga hari ini, dibahas lengkap pada rubrik **Fokus** edisi kali ini. Tidak lupa *Jendela* tampilkan pendapat dari praktisi yang turut ambil bagian dalam pembentukan SIPLah.

Selanjutnya pada rubrik **Resensi Buku**, redaksi suguhkan buku berjudul “Merdeka Belajar: Episode 1-10 Kemendikbudristek”. Buku setebal 122 halaman ini bisa menjadi bacaan menarik bagi pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan untuk mengenal lebih jauh program Merdeka Belajar. Simak penjelasan lebih lengkap pada edisi ini di halaman 30.

Sementara itu, pada rubrik **Seputar Film Indonesia** kali ini, *Jendela* menghadirkan ulasan film yang berjudul “Bumi dan Manusia”. Drama yang dibintangi Iqbaal Ramadhan ini, menceritakan kisah Iqbaal yang berperan sebagai Minke untuk berjuang mempertahankan budayanya di tengah keseharian yang dikelilingi para keturunan Indo-Eropa. Lalu

bagaimana akhir kisah Minke selanjutnya? Baca artikelnya di halaman 22 dan 23.

Pada rubrik **Kebudayaan**, pembaca dapat menikmati artikel tentang Festival Musik Tradisi Indonesia yang berlangsung di Pulau Samosir, Sumatra Utara. Di sini pembaca dapat ikut merasakan suasana festival yang penuh dengan nuansa budaya khas Sumatra Utara. Simak ulasannya di halaman 35 s.d. 37.

Di rubrik **Kajian**, ada suguhan artikel tentang dampak pemberian bantuan operasional Pendidikan bagi lembaga PAUD, sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan anak-anak di usia dini. Ulasannya dapat disimak di halaman 38 s.d. 40.

Terakhir, rubrik yang tidak boleh dilewatkan ada **Bangga Berbahasa Indonesia**, yang kali ini menyajikan ulasan dari Bulan Bahasa dan Sastra yang berlangsung pada Oktober 2021. Selain itu ada juga ulasan untuk mengenal kata baku dan tidak baku. Kedua ulasan tersebut dapat dibaca di halaman 41 dan 42.

Redaksi ucapkan terima kasih atas dukungan para pembaca setia *Jendela* sehingga majalah ini dapat terbit untuk menjadi referensi serta tambahan informasi mengenai kebijakan Kemendikbudristek. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial *Jendela* di Facebook Majalah Jendela Dikbud, juga dengan mengunduh aplikasi Majalah Jendela di Play Store dan App Store. Tinggalkan jejak dengan berkomentar pada salah satu unggahan. Akhir kata, selamat membaca dan ambil manfaat dari artikel-artikel yang tersaji.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Suharti

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbudristek, Muhamad Heikal

Penanggung Jawab: Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto

Pemimpin Redaksi: Azis Purwanto

Redaktur Pelaksana: Aline Rogeleonick

Staf Redaksi: Seno Hartono, Agi Bahari, Lydia Agustina Marida, Desliana Maulipaksi, Andrew Fangidae, Dwi Retnawati, An-an Anwar Hikmat, Denty Anugrahmawaty, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Dennis Sugianto, Nur Widiyanto, Ratih Anbarini, Prima Sari.

Editor: Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick

Sekretariat: Sigit Supriyadi, Heri Nana Kurnia

Fotografi, Desain & Artistik: BKHM

Sekretariat Redaksi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbudristek, Gedung C Lantai 4, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Telp. 021-5711144 Pes. 2413



- kemdikbud.go.id
- Kemdikbud.RI
- @kemdikbud_RI
- KEMENDIKBUD RI
- Kemdikbud.RI
- Kemdikbud.RI
- jendela.kemdikbud.go.id

Salam Mas Menteri



FOTO: BKHM

Upaya mengakselerasi transformasi pendidikan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih inklusif dan relevan. Selain itu, teknologi dapat meningkatkan efisiensi manajemen satuan pendidikan, salah satunya pengadaan barang dan jasa di sekolah.

Kita masih menghadapi beberapa tantangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di sekolah, khususnya berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas. Tantangan tersebut memengaruhi pembelajaran anak-anak di sekolah, sebab guru dan kepala sekolah menjadi kurang terfokus untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan murid. Mengingat tantangan tersebut, kita

membutuhkan sistem yang terbuka dan efisien sehingga pengadaan barang dan jasa di sekolah menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Guna mengatasi tantangan tersebut, kami meluncurkan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau SIPLah untuk pertama kalinya pada 2019. SIPLah merupakan platform belanja digital bagi sekolah yang menyediakan beragam pilihan produk, mulai dari peralatan kantor sampai jasa katering. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pengadaan yang lebih transparan dan mudah dalam hal administrasi dan pelaporan. Dalam waktu dua tahun, sudah ada lebih dari satu juta transaksi di aplikasi SIPLah dengan nilai lebih dari Rp12,6 triliun. Hal ini membuktikan bahwa SIPLah telah memberikan manfaat yang besar untuk sekolah-sekolah di Indonesia.

Namun kami tidak berhenti di situ. Pada Merdeka Belajar episode kedua belas, kami meluncurkan terobosan-terobosan pada aplikasi SIPLah. Dengan terobosan ini, sekolah mendapatkan laporan lengkap tentang status pembelian dan dapat menyampaikan komplain jika ada ketidakcocokan antara barang yang dipesan dengan yang dikirimkan oleh penjual. Pembaruan fitur ini sangat membantu sekolah untuk memenuhi kebutuhan dengan cepat, terbuka dan akuntabel, sehingga guru dan kepala sekolah dapat berfokus pada pemenuhan kebutuhan murid akan pendidikan yang memerdekakan.

Saya mengundang semua sekolah di Indonesia, mari berbelanja dengan aman dengan SIPLah dan bergerak bersama kami mewujudkan Merdeka Belajar.



5.11.2021

Kemendikbudristek Gandeng Ibu Penggerak dalam Mengomunikasikan Program dan Kebijakan



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) bekerja sama dengan komunitas pendidikan terus mengomunikasikan berbagai program dan kebijakan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Komunitas Ibu Penggerak yang mayoritas anggotanya berperan sebagai orang tua, menjadi salah satu mitra Kemendikbudristek dalam komunikasi tersebut.

“Kami membutuhkan dukungan dari masyarakat agar program dan kebijakan Kemendikbudristek dapat berjalan dengan baik, sehingga perlu adanya kerja sama antara Kemendikbudristek dengan komunitas pendidikan yang sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat,”

disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BKHM, Anang Ristanto, dalam kegiatan *Training of Trainer* (ToT) Komunitas Pendidikan dan Kebudayaan di Tangerang Selatan, Jumat (5/11).

Susi Sukaesih, Koordinator Ibu Penggerak dari Sidina *Community* mengapresiasi Kemendikbudristek yang melibatkan masyarakat khususnya orang tua dalam menjalankan program dan kebijakan. Menurutnya, melalui kegiatan ini para orang tua mendapat pencerahan terkait isu pendidikan yang sedang marak di masyarakat, seperti Asesmen Nasional (AN). “Awalnya banyak orang tua yang bingung tentang AN, seperti bagaimana nanti bentuk ujiannya, nilainya, apa yang membedakan dengan Ujian Nasional (UN), dan sebagainya. Dari kegiatan ini kami mendapatkan pencerahan,” ujarnya.

Susi juga mengatakan bahwa ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam mendidik anak. Baginya, pendidikan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke sekolah dan pemerintah. Melalui kegiatan ini, ia berharap agar Ibu Penggerak bisa lebih memahami kebijakan Kemendikbudristek, dan nantinya dapat menjadi pemimpin pembelajaran bagi anak-anaknya di rumah serta akan menjadi *trainer* bagi ibu lainnya dalam menyosialisasikan program-program Kemendikbudristek. (PRM/DLA/ALN)

5.11.2021

Media Sosial Kemendikbudristek Raih Penghargaan Terbaik Anugerah Media Humas 2021

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berhasil meraih penghargaan Terbaik ke-3 kategori media sosial dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2021. Penghargaan tersebut diraih Kemendikbudristek setelah bersaing dengan puluhan instansi pemerintah lainnya untuk kategori kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, dan perguruan tinggi negeri (PTN). Lima instansi lain yang masuk dalam kategori Media Sosial Terbaik yaitu Sekretariat Kabinet, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2021 diselenggarakan secara hibrida, yaitu daring dan luring di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (4/11). AMH 2021

mengangkat tema “Humas Pemerintah Wujudkan Indonesia Pulih, Indonesia Maju”.

Anugerah Media Humas merupakan ajang kompetisi kehumasan bagi instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Ajang penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas hasil kerja humas pemerintah, terutama terkait program penanganan isu Covid-19.

Penganugerahan ini sekaligus untuk menciptakan semangat berkompetisi demi peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintah sesuai dengan amanah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. (ALN/
Sumber: Siaran Pers Kemendikbudristek)

7.11.2021

2.179 Siswa Siap Berlaga di Kompetisi Sains Nasional 2021



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) kembali menggelar Kompetisi Sains Nasional (KSN) tahun 2021. Mengusung tema “Talenta Sains untuk Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh”, sebanyak 2.179 siswa yang terdiri dari 544 siswa tingkat SD/MI, 735 siswa tingkat SMP/MTs, dan 900 siswa tingkat SMA/MA siap beradu kemampuan bidang sains pada ajang tersebut. Kompetisi ini digelar secara daring pada 7 s.d. 13 November 2021.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri, mengungkapkan kebahagiaannya saat menyapa para peserta KSN 2021. “Selamat kepada kalian semua yang selalu berjuang, bersemangat belajar dan membangun atmosfer positif untuk terus berprestasi walaupun masih berada pada situasi pandemi dan keterbatasan. Teruslah merdeka dalam memunculkan mimpi, merealisasikan talenta dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan,” katanya, Minggu (7/11).

Jumeri berpesan, pandemi yang sedang dihadapi agar dijadikan momen oleh semua para pemangku kepentingan pendidikan untuk lebih perhatian lagi kepada sains untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di masa depan. Krisis ini, kata dia, hendaknya menjadi pendorong untuk terus berprestasi meningkatkan kemampuan dan penguasaan di bidang sains. **(ALN/Sumber: Siaran Pers Kemendikbudristek)**

19.11.2021

Optimalisasi Fungsi Perpustakaan Tingkatkan Literasi Peserta Didik



Sebelum hadirnya teknologi digital, perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting untuk mencari informasi. Termasuk di kala pelajar dan mahasiswa memerlukan bahan-bahan dalam menyusun makalah, tugas-tugas di sekolah dan kuliah, atau sekadar untuk menghabiskan waktu dengan membaca. Sementara, di era modern sekarang ini perpustakaan bersaing dengan media digital, di mana hanya dengan mengetikkan kata kunci di internet informasi apa saja dapat dicari dengan mudah.

“Oleh karena itu perpustakaan dituntut untuk bisa mengembangkan inovasi sebagai tempat untuk

mencari informasi dan berbagai rujukan yang mengikuti perkembangan zaman,” demikian disampaikan Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Mulyatsah, pada webinar yang diselenggarakan memperingati

Hari Perpustakaan Internasional yang jatuh setiap tanggal 18 Oktober, Selasa (19/10).

Mulyatsah mengatakan, perpustakaan merupakan unsur yang sangat penting dalam Gerakan Literasi Sekolah. Perpustakaan, kata dia, sebagai ujung tombak budaya literasi sebagai tempat bahan bacaan bagi peserta, guru, anak didik, dan rangkap pendidik sekolah lainnya. Gerakan literasi ini mempunyai peran yang vital untuk menjadikan sumber daya yang unggul untuk belajar sepanjang hayat dengan secara global dan nilai-nilai Pancasila atau profil Pancasila. **(ALN/Sumber: kemdikbud.go.id)**

MERDEKA BELAJAR 1

Transformasi pendidikan dasar dan menengah melalui:

- 1 Mengganti UN menjadi Asesmen Nasional
- 2 Menghapus USBN
- 3 Menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- 4 Menyesuaikan kuota jalur berprestasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi

MERDEKA BELAJAR 4

Organisasi Penggerak, organisasi masyarakat semakin terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa

MERDEKA BELAJAR 7

Program Sekolah Penggerak, mengembangkan sekolah-sekolah katalis melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistik

MERDEKA BELAJAR 8

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan (PK), mencetak lulusan SMK yang terserap dunia kerja atau berwirausaha melalui penyesuaian pendidikan vokasi dengan dunia kerja.

MERDEKA BELAJAR 10

Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Perluasan beasiswa LPDP mencakup:

- 1 Mengganti UN menjadi Asesmen Nasional
- 2 Menghapus USBN
- 3 Menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- 4 Menyesuaikan kuota jalur berprestasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi

MERDEKA BELAJAR 13

Merdeka Berbudaya dengan kanal Indonesiana, menghadirkan kanal media yang bertujuan mawadahi, mengintegrasikan, dan mempromosikan karya serta ekspresi budaya Indonesia.

MERDEKA BELAJAR 2

Kampus Merdeka, mentransformasikan pendidikan tinggi melalui:

- 1 Memberikan kemudahan dalam pembukaan studi baru
- 2 Penyederhanaan akreditasi PT
- 3 Kemudahan untuk menjadi PTN BH
- 4 Hak belajar tiga semester di luar program studi

MERDEKA BELAJAR 3

Perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi lebih fleksibel melalui:

- 1 Transfer dana BOS langsung ke rekening sekolah
- 2 Keleluasaan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS
- 3 Peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS
- 4 Perbaikan sistem pelaporan BOS untuk transparansi dan akuntabilitas

MERDEKA BELAJAR 5

Program Guru Penggerak, program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia.

MERDEKA BELAJAR 6

Transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi melalui:

- 1 Insentif berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) (untuk PTN)
- 2 Dana padanan (*matching fund*) untuk kerja sama dengan mitra (PTN dan PTS)
- 3 Dana kompetitif (*competitive fund*) program kompetisi Kapus Merdeka (PTN dan PTS)

MERDEKA BELAJAR 9

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka, memberikan kemerdekaan bagi murid dari keluarga miskin dan rentan agar dapat berkuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik melalui:

- 1 menaikkan alokasi biaya pendidikan.
- 2 meningkatkan bantuan biaya hidup

MERDEKA BELAJAR 12

Sekolah Aman Berbelanja bersama SIPLah melalui terobosan:

- 1 Pendokumentasian transaksi secara elektronik untuk transparansi dan akuntabilitas.
- 2 Efisiensi anggaran dengan harga yang kompetitif dan opsi yang beragam.
- 3 Partisipasi pelaku UMKM di berbagai daerah.

MERDEKA BELAJAR 11

Kampus Merdeka Vokasi, transformasi pendidikan vokasi melalui pemberian:

- 1 Dana kompetitif kampus vokasi dengan program SMK-D2 jalur cepat dan program peningkatan prodi D3 menjadi Sarjana Terapan (D4).
- 2 Dana padanan kampus vokasi dengan program penguatan pusa unggulan teknologi, hilirisasi produk purwarupa/teknologi, dan start-up produk inovasi perguruan tinggi.

MERDEKA BELAJAR 14

Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual, sekaligus memberi perlindungan bagi para korban tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi.

MERDEKA BELAJAR





Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah

Mengenal SIPLah, Sistem Pengadaan Transparan dan Akuntabel serta Berkelanjutan

Pengadaan barang/jasa (PBJ) di instansi pemerintah, termasuk di dalamnya pengadaan di sekolah, merupakan aktivitas rutin namun memiliki dampak yang besar. Aktivitas pengadaan di instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Tujuan yang hendak dicapai dari PBJ yang transparan dan akuntabel adalah sebuah sistem pengadaan yang berkelanjutan.

Aktivitas PBJ di instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa tujuan jangka panjang yang ingin diraih dari sistem PBJ adalah pengadaan yang berkelanjutan. Pengadaan yang berkelanjutan adalah PBJ yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk kementerian/ lembaga/perangkat daerah sebagai

penggunanya, tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaan.

PBJ juga bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Selain itu PBJ juga untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatkan peran pelaku

usaha nasional. Aspek PBJ tidak hanya terkait dengan belanja barang/jasa, namun juga untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

PBJ di instansi pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 melibatkan sumber daya manusia (SDM) pengadaan yang antara lain terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan lain-lain. Di kementerian/ lembaga/pemerintah daerah, SDM pengadaan tersebut dapat dipenuhi dengan cukup mudah. Lain halnya dengan sekolah atau satuan pendidikan, untuk memenuhi jumlah dan kualifikasi SDM pengadaan sangat sulit.

Untuk memfasilitasi PBJ di satuan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pada 2019, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang saat itu masih bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), meluncurkan sistem PBJ daring (*online*) yang terintegrasi yaitu Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). SIPLah hadir setelah Kemendikbud berkonsultasi secara intens dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan kebijakan PBJ di instansi pemerintah.

Pedoman penggunaan SIPLah di satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan. Permendikbud tersebut digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memperoleh barang/jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh satuan pendidikan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi.

Saat diluncurkan pada 2019, SIPLah menjadi sistem elektronik untuk pembelanjaan sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain memiliki manfaat bagi sekolah, SIPLah juga turut mendorong meningkatnya peran serta UMKM. UMKM di seluruh wilayah Indonesia dapat mendaftar sebagai mitra SIPLah, sehingga memiliki peluang besar untuk dipilih sebagai penyedia barang/jasa oleh sekolah

Dua tahun berjalan sejak pertama kali diluncurkan, pada Agustus 2021, Kemendikbudristek kembali mengangkat SIPLah sebagai kebijakan yang dikemas dalam Merdeka Belajar ke 12: Sekolah Aman Berbelanja Bersama SIPLah.

terdekat. SIPLah juga memungkinkan terjadinya persaingan yang sehat antarmitra SIPLah sehingga tercipta sistem PBJ yang sehat.

Atas inovasi dalam penggunaan SIPLah sebagai sistem PBJ daring yang terintegrasi, Kemendikbud meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Awards dari LKPP kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Inovasi Pengadaan yang Mendukung Transparansi Belanja Pengadaan. Penghargaan ini diterima langsung oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas PBJ) 2020 di Kota Bogor Jawa Barat, tanggal 18 November 2020.

Pada Rakornas PBJ tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tekanan yang tidak mudah, di mana satu sisi sedang berada di tengah pandemi Covid-19 dan di sisi yang lain juga harus menyelamatkan ekonomi. Peredaran uang yang semakin banyak melalui belanja pemerintah akan mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Sudah saatnya kita melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Arahnya adalah kita bukan saja harus memiliki sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan, dan akuntabel, tetapi juga sistem yang mampu meningkatkan *value for money* dengan memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya pada rakyat, pada masyarakat,” ujar Presiden. Presiden juga mengimbau agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memprioritaskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, khususnya hasil UMKM.

Dua tahun berjalan sejak pertama kali diluncurkan, pada Agustus 2021, Kemendikbudristek kembali mengangkat SIPLah sebagai kebijakan yang dikemas dalam Merdeka Belajar ke 12: Sekolah Aman Berbelanja Bersama SIPLah.

Dalam peluncuran ini, SIPLah bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. Sekolah dapat berbelanja dengan aman, sebab alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam transformasi SIPLah, terdapat lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia; lebih banyak pilihan mitra pengiriman; fitur-fitur yang tersedia lebih lengkap terdiri dari pembatalan transaksi, aduan, serta dasbor pemantauan status transaksi untuk menghindari kesalahan maupun penipuan.

Perbaikan demi perbaikan pada SIPLah yang salah satunya dilatarbelakangi oleh hadirnya pandemi, mendorong agar pembelanjaan dana BOS dapat lebih fleksibel. Pengadaan barang dan jasa yang bersumber pada dana BOS memiliki tantangan tersendiri sebelum ada fitur-fitur baru di SIPLah. Mulai dari kepala sekolah yang sering menjadi target intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang memaksakan pembelian barang dan jasa dari mereka sehingga menyalahi aturan, hingga kasus korupsi dana BOS yang kerap terjadi.

Pembelanjaan dana BOS dengan pencatatan manual lebih rentan terhadap korupsi dan kolusi. Hadirnya SIPLah saat ini, mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dampaknya, tercapai efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam, serta terbuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah.

Jika sebelumnya dalam pengadaan barang dan

Jika sebelumnya dalam pengadaan barang dan jasa sekolah tidak dapat memantau status pesanan, sehingga kepala sekolah mengeluhkan prosesnya yang memakan waktu lama, kini sekolah dapat memantau status pesanan melalui dasbor



jasa sekolah tidak dapat memantau status pesanan, sehingga kepala sekolah mengeluhkan prosesnya yang memakan waktu lama, kini sekolah dapat memantau status pesanan melalui dasbor. Semua proses belanja terdokumentasi dan dapat diunduh sehingga sekolah lebih aman melakukan transaksi.

Tak hanya itu, informasi mengenai durasi pengiriman juga dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan durasi kecepatan pengiriman. Masing-masing mitra pasar bekerja sama dengan mitra pengiriman, sehingga sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Sekolah juga dapat melakukan pembatalan transaksi selama penyedia belum konfirmasi. Selain itu, sekolah dapat mengajukan aduan sebelum uang disalurkan ke penyedia jika menemukan masalah dengan barang dan jasa yang diterima. Kemendikbudristek juga dapat mengawasi transaksi yang terkendala sehingga dapat diselesaikan bersama.

Di sisi penyedia juga akan lebih nyaman berjualan. Penyedia kini lebih nyaman berjualan di SIPLah karena proses pendaftaran dan pembayarannya yang lebih cepat, verifikasi pendaftaran penyedia hanya membutuhkan waktu 1x24 jam setelah registrasi, pengecekan pembayaran otomatis, dan pembayaran diteruskan ke penyedia 1x24 jam setelah sekolah membayar. SIPLah dapat diakses secara daring melalui pranala <https://siplah.kemdikbud.go.id/>. (NWD)

Pedoman Pengadaan dengan SIPLah di Sekolah

Fokus pada Tujuan dan Prinsip, Pelaku, Tata Cara, dan Dokumen yang Sederhana



FOTO: BreakingPic/Pexels

Ada empat hal penting yang menjadi pedoman bagi sekolah dan satuan pendidikan secara umum yang menggunakan SIPLah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pertama, tujuan dan prinsip dalam pengadaan, kedua, pelaku yang terlibat dalam proses, ketiga, tata cara yang sesuai ketentuan, dan keempat adalah bagaimana dokumen dalam setiap tahapan dapat disederhanakan.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) yang dilakukan di sekolah, merupakan sebuah transaksi antara pihak sekolah dengan penyedia melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang bermitra dengan pasar loka (*marketplace*), dengan pembiayaan yang berasal dari dana yang dikelola sekolah. Dalam penyelenggaraannya, pengadaan barang dan jasa ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang/jasa oleh satuan Pendidikan, dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa satuan pendidikan melalui sistem informasi pengadaan di sekolah.

Tujuan dan Prinsip

Penggunaan sistem informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di sekolah merupakan upaya untuk menghadirkan sebuah mekanisme PBJ yang mudah, murah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pengadaan yang dilakukan diharapkan dapat membantu sekolah untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi.

Dalam pelaksanaannya, ada enam prinsip yang dipegang agar setiap proses dalam PBJ dapat sesuai dengan tujuannya, yaitu efektif dan efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan dapat dikatakan efektif

Penggunaan sistem informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di sekolah merupakan upaya untuk menghadirkan sebuah mekanisme PBJ yang mudah, murah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

PENYEDERHANAAN DOKUMEN

Keperluan Dokumen	Nilai Pengadaan							
	≤ Rp10jt		> Rp10jt - ≤ Rp50jt		> Rp50jt - ≤ Rp200jt		> Rp200jt	
	1	2	1	2	1	2	1	2
Dokumen Perencanaan	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Dokumen Hasil Perbandingan Penyedia	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
Dokumen Hasil Negosiasi	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
Bukti Kesepakatan	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Surat Pemesanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Berita Acara Serah Terima (BAST)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Bukti Pembayaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Keterangan:
 1 Tidak wajib dilakukan
 2 Wajib dilakukan
 3 Wajib dilakukan dalam hal tidak dapat dilakukan pebandingan harga

dan efisien jika prosesnya mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan bagi sekolah. Lalu pengadaan juga harus transparan, di mana antara sekolah yang melaksanakan PBJ dapat memilih secara terbuka barang dan jasa yang dibutuhkan dari penyedia yang dipilih.

Dengan adanya transparansi, maka ada keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja yang dilakukan pelaksana dan penyedia. Tidak ada transaksi lain yang dilakukan di luar dari sistem yang digunakan. Dampaknya, baik penyedia maupun sekolah dapat bersaing dalam pelaksanaan PBJ. Sekolah bisa memperoleh penawaran yang kompetitif dari penyedia.

Proses yang terbuka dan bersaing mendorong sekolah dan penyedia untuk berlaku adil, terutama melindungi dan memberikan rasa aman bagi setiap pelaku

maupun penanggung jawab yang terlibat dalam proses PBJ tersebut. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tentunya memperbaiki kualitas PBJ di sekolah tersebut.

Pelaku yang terlibat

Proses pengadaan barang dan jasa dengan SIPLah mengalami pergeseran akibat perubahan peraturan yang menaunginya. Menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2019, yang disebut pelaku ada tiga pihak, yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, dan penyedia. Kelompok pelaku ini kemudian diperbarui menurut Permendikbud nomor 14 tahun 2020 yang masih berlaku hingga 2021, yaitu hanya ada dua pelaku utama, yaitu pelaksana dan penyedia.

Pelaksana adalah pihak yang melakukan

Proses yang terbuka dan bersaing mendorong sekolah dan penyedia untuk berlaku adil, terutama dalam melindungi dan memberikan rasa aman bagi setiap pelaku maupun penanggung jawab yang terlibat dalam proses PBJ.

PBJ atas nama sekolah atau satuan pendidikan, yang biasanya merupakan kepala sekolah yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PBJ di satuan pendidikan tersebut. Dan dalam pelaksanaannya, kepala sekolah dapat menunjuk pendidik dan atau tenaga kependidikan yang tercatat dalam data pokok pendidikan (dapodik) secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan PBJ.

Pelaku kedua adalah penyedia, yaitu pihak dari dunia usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kesepakatan. Penyedia dapat berupa perorangan atau badan usaha yang memenuhi syarat dan kriteria seperti memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), identitas penyedia, dan kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Selain itu, PBJ satuan pendidikan melalui SIPLah harus memenuhi syarat dan kriteria seperti yang tercantum dalam SIPLah.

Adanya perubahan peraturan yang menaungi PBJ, berdampak juga pada sasaran pengguna SIPLah. Jika pada Permendikbud yang keluar pada tahun 2019 sasaran SIPLah hanya sekolah, maka di Permendikbud no. 14 tahun 2020, tidak hanya sekolah yang menjadi sasaran pengguna melainkan keseluruhan satuan pendidikan. Ada tiga jenis satuan pendidikan, yaitu satuan pendidikan formal, nonformal, dan kesetaraan. Dari sisi jumlah pun terdapat kenaikan, jika pada 2019 terdapat 220.283 sekolah yang menjadi target, maka sejak 2020 terdapat 442.960 satuan pendidikan yang menjadi sasaran penggunaan SIPLah.

Tahapan dalam PBJ Satuan Pendidikan

Ada tiga tahap dalam PBJ, yaitu persiapan pengadaan, penetapan penyedia, dan pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Tahap persiapan pengadaan merupakan kegiatan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang meliputi jumlah barang/jasa, spesifikasi atau ruang lingkup barang/jasa, waktu dan lokasi serah terima, alokasi anggaran, dan persyaratan penyedia.

Dalam tahap ini, satuan pendidikan wajib mencantumkan sumber dana yang digunakan dalam pengadaan. Sumber pendanaan dapat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) BOS Reguler 2019, SiLPA BOS Afirmasi 2019, SiLPA BOS Kinerja 2019, dan Bantuan Pemerintah untuk Penerapan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di SD.

Selanjutnya, tahap kedua yang harus dilaksanakan dalam PBJ satuan pendidikan adalah penetapan penyedia oleh pelaksana berdasarkan dokumen perencanaan melalui SIPLah secara terbuka dan transparan. Penetapan penyedia umumnya dilakukan secara daring, tapi dapat dilakukan secara luring jika terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLah atau satuan pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses SIPLah.

Tahap ketiga dalam PBJ satuan pendidikan adalah pelaksanaan kesepakatan pengadaan, yaitu pengiriman barang/jasa yang dilakukan oleh penyedia, pemeriksaan barang/jasa yang dilakukan oleh pelaksana, penerimaan barang/jasa yang dilakukan jika hasil pemeriksaan barang/jasa sesuai hasil kesepakatan, dan pembayaran dilakukan setelah berita acara serah terima disetujui kedua pelaku PBJ. Biaya yang timbul akibat dari ketidaksesuaian barang/jasa merupakan tanggung jawab penyedia.

PBJ satuan pendidikan dapat dilakukan secara daring dan luring. Bagi PBJ secara daring, semua dokumen disediakan oleh sistem, sedangkan untuk luring dilakukan secara manual. Negosiasi akan diwajibkan jika satuan pendidikan tidak memiliki opsi atau pilihan penyedia, namun bukti negosiasi yang harus disertakan.

Penyederhanaan Dokumen

Ada tujuh dokumen yang harus disiapkan dalam proses PBJ di satuan pendidikan. Ketujuh dokumen tersebut adalah dokumen perencanaan, dokumen hasil perbandingan penyedia, dokumen hasil negosiasi, bukti kesepakatan, surat pemesanan, bukti acara serah terima (BAST), dan bukti pembayaran. Dari ketujuh dokumen ini baik pelaksana maupun penyedia dapat menyiapkannya sesuai dengan jumlah nilai pengadaan. Ada empat rentang nilai pengadaan yang dapat dilakukan di SIPLah, yaitu di bawah Rp10 juta, antara Rp10 juta s.d. Rp50 juta, antara Rp50 juta s.d. Rp200 juta, dan di atas Rp200 juta. **(PRM)**



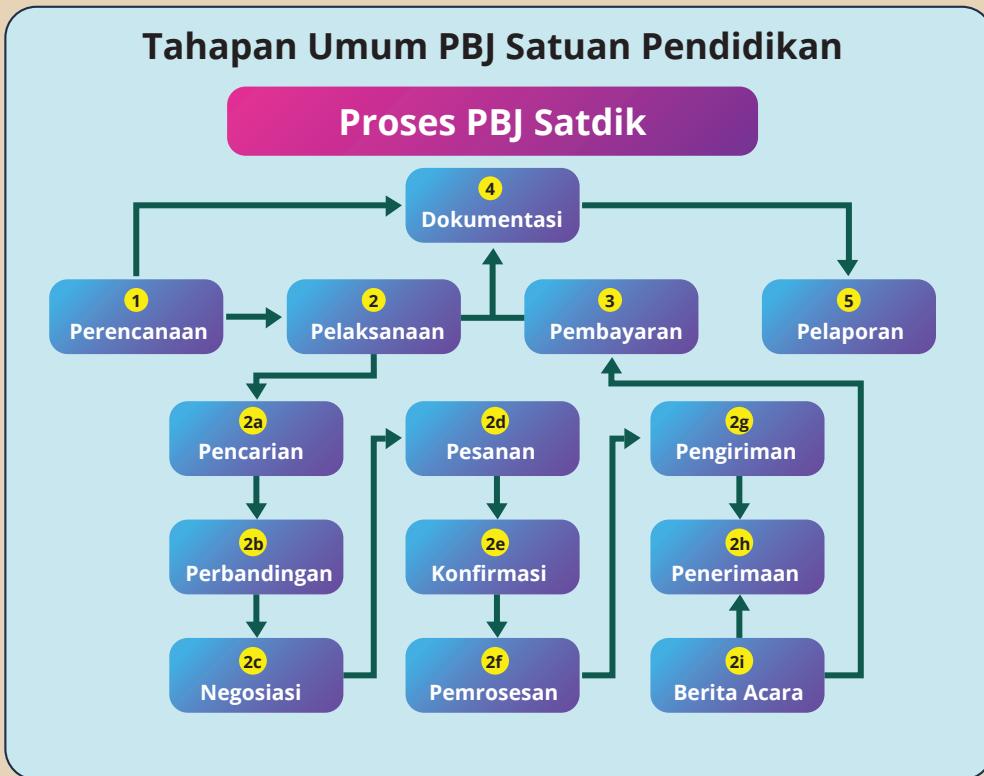
Klasifikasi Tahapan Berdasarkan Nominal

Perbedaan Tahapan PBJ dengan Nilai di Bawah Rp10 Juta hingga di Atas Rp200 Juta

Pengadaan PBJ di satuan pendidikan secara umum menempuh tiga tahapan utama, yaitu: persiapan pengadaan, penetapan penyedia, dan pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Namun demikian, detail tahapan dan dokumen yang perlu disiapkan dapat disesuaikan dengan jumlah nilai transaksi yang dilakukan. Nilai transaksi dapat dibedakan dalam empat klaster, yaitu nominalnya di bawah Rp10 juta, Rp10 juta-50 juta, Rp50 juta-Rp200 juta, dan di atas Rp200 juta.

Setiap tahap dalam proses PBJ perlu dilakukan dengan sangat teliti, begitu pula dengan dokumen yang harus disiapkan. Pada tahap perencanaan, satuan pendidikan menyiapkan dokumen yang terkait dengan informasi jumlah barang/jasa, spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa, waktu dan lokasi serah terima, alokasi anggaran, dan persyaratan penyedia. Dokumen tersebut wajib tersedia untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp10 juta.

Setelah persiapan selesai, langkah berikutnya masuk pada tahap penetapan penyedia. Ada dua kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan di tahap ini, yaitu memilih dan menetapkan calon



penyedia, lalu membuat kesepakatan pengadaan. Saat memilih penyedia, satuan pendidikan perlu memerhatikan berapa nominal dari barang/jasa yang akan dibeli. Ada ketentuan untuk melakukan perbandingan harga dan kualitas dari beberapa calon penyedia untuk setiap klaster nilai transaksi.

Penetapan penyedia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu berdasarkan perbandingan harga dan kualitas barang/jasa serta pembuatan kesepakatan pengadaan. Perbandingan harga dan kualitas barang/jasa dilakukan oleh calon penyedia yang menawarkan harga berbeda untuk

Jika transaksi PBJ berada dalam kisaran nominal di bawah Rp10 juta hingga Rp50 juta, perbandingan ini tidak perlu dilakukan. Untuk transaksi dengan nominal Rp50 juta s.d. Rp200 juta, satuan pendidikan melaksanakan perbandingan setidaknya kepada dua calon penyedia. Dan untuk transaksi di atas Rp200 juta, maka satuan pendidikan harus melakukan perbandingan kepada sedikitnya tiga calon penyedia. Dan apabila penyedia hanya ada satu, maka satuan pendidikan wajib melakukan negosiasi kepada calon penyedia tersebut, dan bukti negosiasi menjadi dokumen persyaratan.

Tahap ketiga, setelah penyedia terpilih dari beberapa calon yang diseleksi di tahap sebelumnya, dilakukan pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Di tahap ini, penyedia akan mengirimkan pesanan barang/jasa yang telah disepakati dengan pelaksana di satuan pendidikan. Barang yang dikirimkan oleh penyedia, akan diperiksa oleh pelaksana setibanya di satuan pendidikan. Barang yang sudah diterima dan diperiksa, apabila sudah memenuhi kesepakatan, maka dibuat berita acara serah terima (BAST) oleh pelaksana. BAST tersebut kemudian yang akan menjadi dokumen persyaratan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pembayaran.

Dalam hal barang yang dikirimkan penyedia dan diterima pelaksana tidak sesuai dengan

PBJ wajib dilakukan melalui SIPLah namun hal tersebut dapat dikecualikan jika terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLah dan/atau satuan pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses SIPLah.

pembelian barang dengan jumlah satuan (eceran) dan borongan (grosir). Sedangkan pembuatan kesepakatan pengadaan dilakukan berdasarkan kesepakatan pelaksana dan penyedia yang dibuktikan dengan perjanjian dalam bentuk surat pemesanan dalam SIPLah atau bukti kesepakatan dalam luring.

Apabila barang yang dikirimkan penyedia dan diterima pelaksana tidak sesuai dengan kesepakatan, maka setiap biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab penyedia, misalkan untuk retur atau biaya pengiriman kembali.

kesepakatan, maka setiap biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab penyedia, misalkan untuk retur atau biaya pengiriman kembali.

Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan SIPLah memungkinkan transaksi dihitung tidak hanya secara eceran, namun dapat dihitung secara borongan (grosir). Misal, satu barang yang dipesan dengan jumlah 10 buah dihargai dengan nominal Rp10 ribu, jika dipesan sebanyak 50 buah maka per satu buah akan dihargai Rp9 ribu, dan jika dipesan sebanyak 100 buah maka akan dihargai per buahnya Rp8 ribu. SIPLah menyediakan otomatisasi harga Borongan (grosir).

Sebelum melaksanakan PBJ, satuan pendidikan wajib memperhatikan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Di antara komponen yang perlu diperhatikan adalah harga transaksi yang merupakan akumulasi dari harga barang, ongkos kirim (ongkir), dan pajak, kemudian ketepatan pemilihan penyedia barang/jasa; serta pembayaran yang dilakukan melalui mitra pasar daring.

Persiapan pengadaan dapat dilakukan secara daring maupun luring. PBJ wajib dilakukan melalui SIPLah namun hal tersebut dapat dikecualikan jika terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLah dan/atau satuan pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses SIPLah.

Mekanisme Transaksi dalam PBJ sesuai Nilai Transaksi

Pelaksanaan PBJ di satuan pendidikan untuk transaksi di bawah Rp10 juta adalah, sebagai berikut: (1) memilih dan menetapkan penyedia dan membuat kesepakatan pembelian, (2) melakukan pemesanan dan konfirmasi transaksi, (3) proses pengiriman, (4) pemeriksaan dan pemesanan, (5) serah terima pemesanan dengan pengisian BAST, (6) pembayaran melalui *marketplace* untuk diteruskan ke penyedia. Semua tahapan pengadaan yang dilakukan secara daring, bukti PBJ satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui SIPLah.

Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya.

Sementara untuk pelaksanaan PBJ bagi transaksi yang berada pada kisaran di atas Rp10 juta hingga Rp50 juta, tahapannya adalah sebagai berikut: (1) menetapkan dokumen perencanaan PBJ, (2) memilih dan menetapkan penyedia dan membuat kesepakatan pembelian, (3) pemesanan dan konfirmasi transaksi, (4) proses pengiriman, (5) pemeriksaan pemesanan, (6) serah terima pemesanan dengan pengisian BAST, (7) untuk pengadaan secara daring melalui SIPLah, pembayaran melalui *marketplace* akan diteruskan ke penyedia. Adapun untuk tahap 2 s.d 7 beserta bukti PBJ satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui SIPLah.

Berikutnya, pelaksanaan PBJ di satuan pendidikan dengan nilai transaksi antara Rp50 juta sampai Rp200 juta, yaitu: (1) menetapkan dokumen perencanaan PBJ, (2) melakukan perbandingan harga dan kualitas terhadap minimal dua calon penyedia. Dalam hal tidak terdapat perbandingan harga maka pelaksana wajib melakukan negosiasi pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia. Setelah itu, memilih dan menetapkan penyedia dan membuat kesepakatan pembelian.

Lalu, (3) pemesanan dan konfirmasi transaksi, (4) proses pengiriman, (5) pemeriksaan dan pemesanan, (6) serah terima pemesanan dengan pengisian BAST, (7) untuk pengadaan secara daring melalui SIPLah pembayaran melalui *marketplace* akan diteruskan ke penyedia. Adapun tahap 2 s.d 7 beserta bukti PBJ satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui SIPLah.

Kemudian, untuk pelaksanaan PBJ di satuan pendidikan dengan nilai transaksi lebih dari Rp200 juta, tahapannya adalah: (1) menetapkan dokumen perencanaan PBJ, (2) melakukan perbandingan harga dan kualitas terhadap minimal tiga calon penyedia, namun dalam hal tidak terdapat perbandingan harga pelaksana wajib melakukan negosiasi pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia. Setelah itu, memilih dan menetapkan penyedia dan membuat kesepakatan pembelian.

Lalu, (3) pemesanan dan konfirmasi transaksi, (4) proses pengiriman, (5) pemeriksaan pemesanan, (6) serah terima pesanan dengan pengisian BAST, (7) pembayaran ke *marketplace* untuk pengadaan secara daring melalui SIPLah yang diteruskan ke penyedia. Adapun tahap 2 s.d 7 beserta bukti PBJ satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui SIPLah. **(DLA)**



FOTO: BKHM

Proses Bisnis SIPLah

Alur Kerja dari Kemendikbudristek Hingga Dapat Digunakan oleh Penyedia dan Satuan Pendidikan

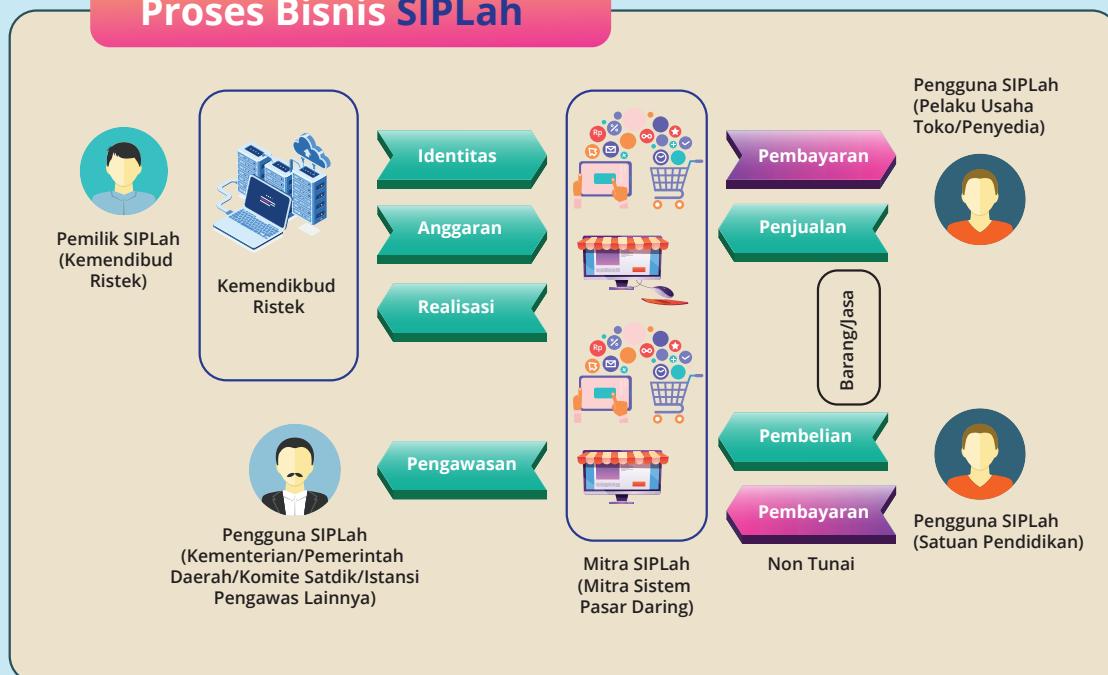
SIPLah dirancang untuk memudahkan pertemuan antara mitra pasar daring yang mengumpulkan beragam penyedia atau penjual, dengan satuan pendidikan sebagai pengguna atau pembeli barang. Kemendikbudristek, sebagai pemilik aplikasi, menyediakan sistem yang memudahkan transaksi antara keduanya.



Tahap pertama yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam pengelolaan SIPLah adalah menjalin kerja sama dengan mitra, dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang memiliki loka pasar tersendiri. Dalam kerja sama tersebut, setiap toko/pelaku usaha/penyedia yang tergabung di loka pasar mitra SIPLah, akan tercatat juga di SIPLah. Demikian pula satuan pendidikan yang tercatat di SIPLah, akan terhubung ke loka pasar, sehingga jika terjadi transaksi antara keduanya, data transaksi akan terekam.

Saat satuan pendidikan ingin melakukan pengadaan barang dan jasa, cukup masuk ke loka pasar yang

Proses Bisnis SIPLah



diinginkan. Saat ini ada delapan belas loka pasar yang tergabung di SIPLah. Satuan pendidikan dapat memilih penyedia yang sesuai dengan kebutuhan. Sebelum bertransaksi, satuan pendidikan perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti barang/jasa yang diadakan harus sesuai petunjuk teknis, harga transaksi termasuk harga barang, ongkos kirim, dan pajak, pemilihan penyedia, dan pembayaran melalui pasar daring.

Jika semua hal tersebut telah melalui proses pemilihan yang matang, maka proses jual beli dapat dilaksanakan. Layaknya loka pasar biasa, setiap dana transaksi yang dibayarkan oleh satuan pendidikan sebagai pembeli akan masuk ke rekening pasar loka sebelum disalurkan ke penyedia/toko/pelaku usaha. Dana tersebut baru akan disalurkan kepada penyedia setelah barang/jasa apabila sudah ada konfirmasi dari satuan pendidikan yang telah menerima barang/jasa tersebut. Apabila barang dan jasa yang dikirim oleh penyedia tidak sesuai kesepakatan dengan satuan pendidikan, maka barang tersebut dapat dikembalikan dengan pembiayaan seluruhnya dibebankan kepada penyedia/toko/pelaku usaha.

Setiap transaksi yang terjadi di pasar daring yang terhubung dengan SIPLah diawasi oleh beberapa pihak, yaitu kementerian, pemerintah daerah, komite satuan pendidikan, dan instansi pengawas lainnya.

Bagaimana Penyedia Barang dan Jasa Mendaftar di SIPLah?

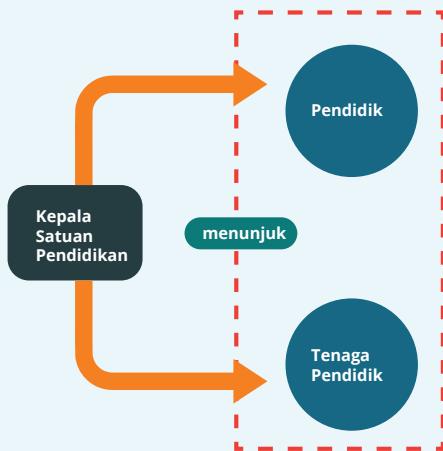
Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah (SIPLah), Kemendikbudristek membuka peluang bagi seluruh mitra pasar daring untuk bergabung di Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah (SIPLah). Para calon mitra SIPLah yang ingin menjadi mitra dapat mengirimkan Surat Peminatan ke Kemendikbudristek.

Proses pendaftaran tidak membutuhkan waktu lama, verifikasi pendaftaran penyedia hanya membutuhkan waktu 1x24 jam setelah registrasi. Demikian pula dengan pembayaran, pengecekan pembayaran sudah otomatis dan dapat diteruskan ke penyedia 1x24 jam setelah sekolah membayar.

Untuk menjadi mitra SIPLah, para penyedia barang dan jasa mengunjungi <https://siplah.kemdikbud.go.id>; lalu pilih satu/lebih mitra pasar, tekan tombol 'Daftar'; serta lengkapi persyaratan yang terdiri dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), identitas penyedia (NIK), dan deskripsi kemampuan menyediakan barang/jasa. Kemudian lakukan verifikasi data melalui surat elektronik (*email*), maka penyedia baru dapat login dan siap berjualan.

Sebelum ditetapkan sebagai mitra SIPLah, calon mitra SIPLah harus menempuh serangkaian proses

Pelaksana



*Permendikbud No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan

Pelaksana

Bentuk Penyedia	Syarat dan Kriteria
Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Identitas Penyedia (NIK) Kemampuan Menyediakan Barang/Jasa
Badan Usaha	

seleksi, yakni evaluasi administrasi, evaluasi teknis, pengujian mandiri (*selftest*) masing-masing calon mitra, *Pra-User Acceptance Test*, pengujian *User Acceptance Test* dan pengujian terhadap perbaikan guna memenuhi kriteria yang telah ditentukan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kemendikbudristek.

Jalin Kerja Sama dengan 18 Mitra Pasar Daring Baru

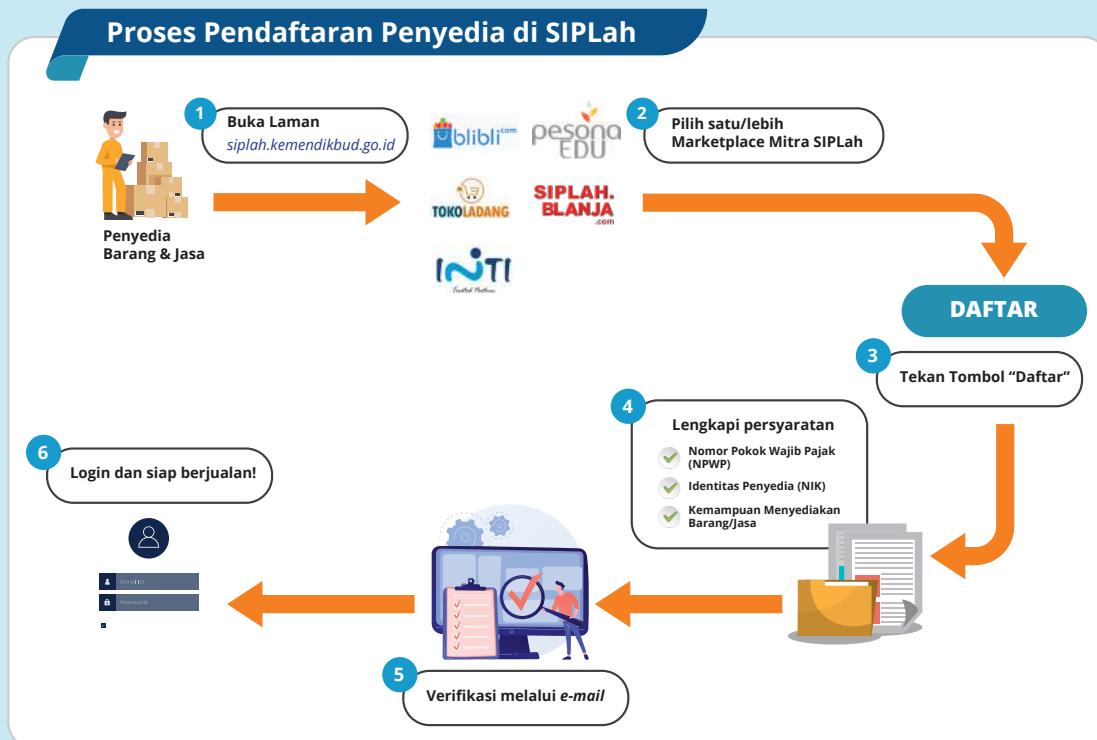
Bukan sekadar menaikkan jumlah sekolah dan satuan Pendidikan yang menggunakan SIPLah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga terus mengembangkan kerja sama dengan penyedia. September 2021, terdapat delapan belas mitra pasar daring baru yang digandeng dalam bingkai kerja sama.

SIPLah dirancang untuk memanfaatkan sistem pasar daring (*online marketplace*) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan.

Di tahun 2021, dari total 41 perusahaan yang mendaftar, tercatat 18 mitra yang lolos seleksi. Tepat pada 3 September 2021,



Proses Pendaftaran Penyedia di SIPLah



TIPS MEMILIH PENYEDIA



Pilih penyedia yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan



Jika seluruh kebutuhan tidak bisa dipenuhi satu penyedia, pilih beberapa penyedia dengan spesifikasi yang sama.



Pertimbangkan lokasi sekolah dengan lokasi penyedia, supaya tidak berat di ongkos kirim



Jangan lupa cek ulasan pembeli lain terhadap layanan yang diberikan penyedia

Kemendikbudristek melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) melakukan penandatanganan Kontrak Baku bersama 18 Mitra SIPLah Periode 2021-2023.

Mitra ini yaitu PT. Eureka Bookhouse (Eureka), PT. Global Digital Niaga (Bibli.com), PT. Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (SIPLah.id/INTI), PT. Ladang Karya Husada (Ladang), PT. Pesona Edukasi (PesonaEdu), PT. Air Mas Perkasa (Raja Store), PT. Bengawan Cable Vision (adasemua), PT. Buka Pengadaan Indonesia (Bukalapak), PT. Datascrip (Hall.id), PT. Deka Sari Perkasa (Innolaku), PT. Emaro Online Indonesia (KlikMRO), PT. Intan Pariwara (IP).

Selanjutnya, ada PT. Masmedia Buana Pustaka (masmedia), PT. Mitra Edukasi Nusantara (Gramedia), PT. Omah Teknologi Indonesia (Belanja24), PT. Sandiarta Sukses (BigOne), PT. Temprina Media Grafika (Temprina), dan PT. Tiga Serangka Pustaka Mandiri (TISERA). **(SEN)**

Peta Jalan SIPLah

Dari Inisiasi Hingga Integrasi dan Sinergi

Sejak diluncurkan pada 2019, SIPLah terus mengalami pertumbuhan yang dibuktikan dengan hadirnya fitur-fitur baru yang semakin memudahkan transaksi. Mulai dari mudahnya proses pendaftaran bagi penyedia yang dapat dilakukan secara daring tanpa dipungut biaya, hingga tersedianya dokumentasi seluruh transaksi secara elektronik yang memudahkan pertanggungjawaban.

Menilik ke belakang, pengembangan SIPLah dimulai pada 2018 dengan melakukan analisis kebutuhan serta perancangan. Kemudian pada 2019 mulai dilakukan sayembara mitra dan pengembangan sistem. SIPLah resmi beroperasi pada Juni 2019.

Pada awal SIPLah berjalan, jumlah sekolah yang disasar untuk memanfaatkan sistem ini berjumlah 220.283 sekolah. Kala itu, penggunaan SIPLah belum sefleksibel sekarang. Transaksi dibatasi hanya sampai dengan 200 juta dan dokumentasi masih manual. Di tahun berikutnya, terdapat peningkatan signifikan sasaran pengguna sebagai dampak diperluasnya cakupan yang awalnya hanya sekolah, menjadi satuan pendidikan. Akibatnya, 442 ribu satuan pendidikan didorong untuk memanfaatkan SIPLah.

Fitur yang disediakan di SIPLah pun sudah lebih berkembang, di mana pembelanjaan dapat dilakukan lebih fleksibel tidak terbatas pada dana BOS, bebas batas nilai transaksi, dan

dokumentasi sudah dalam bentuk digital. Selain itu juga terdapat *dashboard* pengawasan.

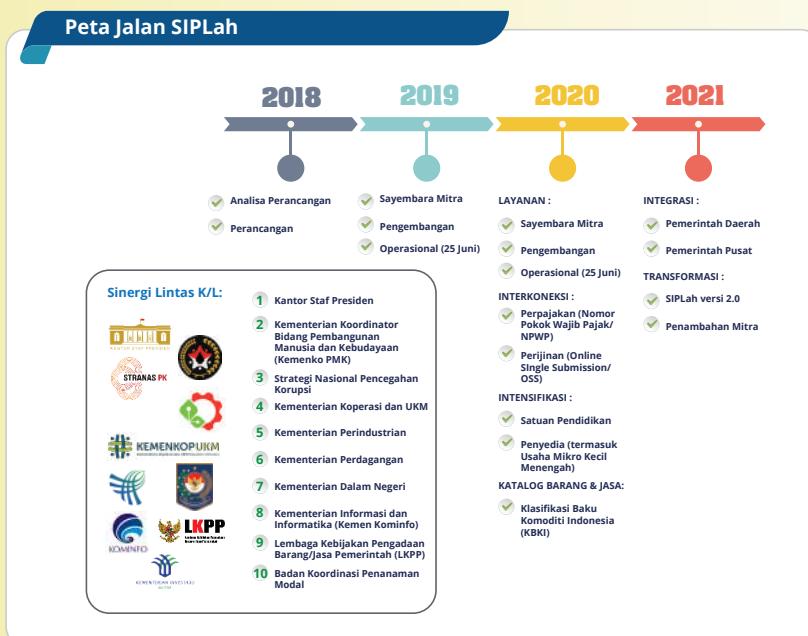
Dari sisi pemanfaatan, setiap tahun PBJ dengan SIPLah mengalami pertumbuhan. Pada 2019 terdapat 20.180 satuan pendidikan yang aktif bertransaksi dengan SIPLah. Angka ini mengalami perkembangan pesat pada 2020, tercatat 126.398 satuan pendidikan aktif bertransaksi dengan SIPLah. Sampai pada Mei 2021, sudah 60.834 satuan pendidikan aktif bertransaksi. Secara kumulatif, sampai dengan saat ini total sudah 146.963 sekolah yang aktif bertransaksi dengan SIPLah.

Jumlah mitra (toko atau penyedia) yang mendaftar pada sistem SIPLah pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada 2019 ada 15.169 penyedia yang terdaftar dalam SIPLah, maka jumlah ini meningkat hampir empat kali lipat pada 2020, yakni sebanyak 54.711 penyedia. Pada 2021 bulan Mei, terdapat 20.714 penyedia yang terdaftar. Total kumulatif toko atau penyedia yang sudah terdaftar hingga saat ini adalah 90.594.

Jika melihat pada keaktifan mitra (toko atau penyedia) bertransaksi, jumlah toko/penyedia yang aktif pada 2020

Kemudahan transaksi tanpa batas nilai dan penagihan yang terproses dalam sistem, berujung pada pengadaan barang dan jasa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Peta Jalan SIPLah



pun mengalami peningkatan pesat dibandingkan pada 2019. Jika pada 2019 penyedia yang aktif bertransaksi hanya berjumlah 1.319, maka pada 2020 angka ini meningkat hampir enam belas kali lipat, menjadi 20.547. Pada 2021, jumlah penyedia yang aktif bertransaksi hingga bulan Mei sudah berjumlah 14.965. Dalam dua tahun, total jumlah toko/penyedia yang aktif bertransaksi sudah mencapai 26.025.

Pada 2020, SIPLah mengalami beberapa pengembangan sistem, seperti disediakannya dasbor pengawasan dan layanan interkoneksi perpajakan (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) dan perizinan (*Online Single Submission/OSS*).

Selain itu, dilakukan juga intensifikasi terhadap satuan pendidikan dan penyedia, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Yang terakhir, disediakannya katalog barang dan jasa sebagai Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI).

Pada tahun 2021, pengembangan SIPLah berfokus pada integrasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, transformasi menuju SIPLah versi 2.0, serta penambahan mitra. Sinergi antarkementerian dan lembaga pun dilakukan untuk mendukung sistem yang makin terintegrasi, bermanfaat, dan transparan.

Pengembangan yang dilakukan terhadap SIPLah tak lain untuk menjamin dirasakannya keuntungan-keuntungan oleh satuan pendidikan saat memanfaatkan aplikasi PBJ tersebut. Kemudahan transaksi tanpa batas nilai dan penagihan yang terproses dalam sistem, berujung pada pengadaan barang dan jasa yang transparan dan dapat

Pada awal SIPLah berjalan, jumlah sekolah yang disasar untuk memanfaatkan sistem ini berjumlah 220.283 sekolah. Kala itu, penggunaan SIPLah belum sefleksibel sekarang.

dipertanggungjawabkan dengan baik.

Terhusus pada masa pandemi, Kemendikbudristek mendorong adanya perbaikan fitur karena jumlah pengguna SIPLah yang mengalami pertumbuhan luar biasa. Menurut data terakhir, hingga bulan Mei 2021 saja sudah lebih dari 146.000 sekolah yang menggunakan SIPLah.

Pertumbuhan pengguna ini berbanding lurus dengan fakta bahwa tahun ini Kemendikbudristek telah mengucurkan dana BOS sebesar Rp53,4 triliun untuk 216.000 sekolah. Anggaran BOS ini meningkat dari tahun 2019 yang masih pada angka Rp51 triliun. Dan sekolah pun diperbolehkan membelanjakan dana BOS secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah masing-masing, termasuk untuk melengkapi persiapan PTM terbatas.

Guna mendukung pemanfaatan SIPLah tidak hanya dari sisi satuan Pendidikan, pada bulan Maret 2021, SIPLah membuka peluang bagi bergabungnya mitra baru. Kemudian pada bulan April sampai Juli dilakukan proses pemilihan dan pengembangan sistem calon mitra (toko atau penyedia). Hasilnya, pada September 2021 Kemendikbudristek menandatangani kesepakatan kerja sama dengan delapan belas mitra SIPLah untuk tahun 2021-2023. (DIT)

Capaian SIPLah

Beragam Penghargaan dan Rencana ke Depan

Sejak diinisiasi pada tahun 2018, SIPLah telah mengakomodasi jutaan transaksi pengadaan barang dan jasa dengan nominal yang signifikan. Pada tahun 2020, SIPLah mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai praktik baik penerapan katalog elektronik dan loka pasar dalam pengadaan barang jasa, dan program Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) oleh Presiden Republik Indonesia.

Seiring dengan terus meningkatnya mitra SIPLah yang memberikan pelayanan kepada satuan pendidikan, jumlah sekolah pengguna SIPLah pun terus meningkat dan telah melayani lebih dari satu juta transaksi pembelanjaan di sekolah.

Tercatat, sebanyak 1.073.897 transaksi dilakukan melalui SIPLah, dengan nilai Rp12,6 triliun yang melibatkan 26.025 penyedia barang dan jasa. Atas capaian ini, Kemendikbudristek mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai praktik baik penerapan e-katalog dan lokapasar dalam pengadaan barang jasa pada program Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) tahun 2020 oleh Presiden Republik Indonesia.

Di samping itu, sistem informasi ini juga mendapat penghargaan Indonesia Government Procurement Awards dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Inovasi Pengadaan yang Mendukung Transparansi Belanja Pengadaan. Penghargaan ini diberikan karena SIPLah dinilai menjadi salah satu platform yang mendukung peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan satuan pendidikan.

Penggunaan SIPLah ini telah sejalan dengan manfaat dan tujuan dari tata kelola keuangan yang baik, yaitu pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dengan SIPLah juga tercapai efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam, serta

Penggunaan SIPLah ini telah sejalan dengan manfaat dan tujuan dari tata kelola keuangan yang baik, yaitu pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.

terbuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah.

Untuk itu, alur pembelanjaan pada SIPLah terus berupaya menjamin proses transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi intimidasi kepada kepala sekolah oleh pihak-pihak tertentu. Dampaknya, satuan Pendidikan dapat melakukan pengadaan barang dan jasa dengan aman, nyaman, tanpa rasa khawatir.

Dengan pencapaian yang telah diraih, Kemendikbudristek terus mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah. Pada 2021, fokus pengembangan SIPLah fokus pada integrasi dan transformasi. Integrasi ini dilakukan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan transformasi yang dilakukan adalah dengan meluncurkan SIPLah versi 2.0, juga penambahan mitra.

Setidaknya ada sepuluh kementerian dan Lembaga yang diajak bersinergi. Kesepuluh K/L tersebut adalah Kementerian dan lembaga yang bersinergi dengan Kemendikbudristek adalah Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Kementerian Koperasi dan UMKM

Grafik perkembangan jumlah transaksi SIPLah



Grafik perkembangan nilai transaksi SIPLah



Alur pembelanjaan pada SIPLah terus berupaya menjamin proses transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi intimidasi kepada kepala sekolah oleh pihak-pihak tertentu.

(KemenkopUKM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Badan Koordinasi Penanaman Modal. (DNS)



FOTO: BKHM

Praktik Baik Stop Perundungan dan Intoleransi:

Belajar dari Program *Buddy* dan Pohon Kerukunan Pastikan Anak Aman dan Nyaman Belajar

Perundungan dan intoleransi adalah dua dari tiga dosa besar pendidikan yang terus diberantas Kemendikbudristek melalui Merdeka Belajar. Menurut PISA (2018), 41 persen pelajar Indonesia berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan (dikutip dari cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/merdekadariperundungan). Di sisi lain, ada hal yang menggembirakan, karena ternyata sejumlah sekolah dan guru hebat terus menggerakkan praktik-praktik baik guna menghentikan budaya *bullying* dan intoleransi

Cerita Wiwik Budiasih dari Sekolah Dasar Negeri Pondok Kacang Barat 03 Tangerang Selatan, bisa dijadikan contoh. Wiwik menyaksikan sendiri bagaimana para guru harus melatih diri menghadapi potensi kekerasan di sekolah. Butuh kesabaran dan belajar tanpa henti. Refleksinya yang jujur begitu menyegarkan. “Jujur, saya juga pernah membentak siswa. Tapi kemudian saya belajar di GSM. Ternyata *Masyaallah*, kesalahan saya banyak sekali. Dan ternyata kita bisa menumbuhkan disiplin positif di sekolah dengan cara-cara yang memanusiaikan anak-anak,” terang Wiwik.

Wiwik berkisah, sekolahnya telah lama menerapkan Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) yang amat



memengaruhi berkurangnya kekerasan di sekolah. SDN Pondok Kacang Barat 03 memiliki kebijakan unik “Program *Buddy*”. *Buddy* dalam Bahasa Inggris berarti teman akrab atau sahabat. Dari program ini diketahui bahwa umumnya anak-anak melakukan kekerasan karena minim cara memecahkan masalah, sementara sekolah jarang memberi pembelajaran berbasis penyelesaian masalah. Dan program *buddy* mengisi celah tersebut.

Dalam kasus perundungan, biasanya, yang merundung adalah kakak kelas. Dari fakta tersebut, dibuatlah mekanisme supaya kakak kelas 4, 5, dan 6 dapat membimbing adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Ini yang disebut Program *Buddy*. Implementasinya misal ketika Pengenalan Lingkungan Sekolah, para kakak bertugas menggandeng dan mengajak adik-adiknya keliling.

Kegiatan ini, rupanya, menumbuhkan rasa tanggung jawab, ingin membimbing, dan empati siswa yang



FOTO: facebook page Gerakan Sekolah Menyenangkan

lebih tua kepada yang lebih muda. Program Buddy juga mengizinkan para siswa kelas 4, 5, dan 6 mengajarkan membaca dan membacakan buku cerita di sudut baca kelas.

Pembentukan tim warga sekolah yang gotong-royong memberantas perundungan menjadi kunci keberhasilan program. Di sekolah Wiwik, ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan, yang isinya wali kelas, para guru, pelatih ekskul, dan komite sekolah. Di sana juga dipastikan bahwa tantangan dan kesulitan yang dihadapi para guru, diselesaikan bersama dalam tim dengan kepemimpinan ketua tim.

Wiwik juga menekankan pentingnya sekolah punya prosedur penanganan kekerasan, bahkan ketika mewawancarai anak. Sudut pandang yang dipakai sesuai pengalaman anak, baik korban maupun pelaku. "Contohnya, kepada anak-anak yang melakukan, akan ditanyakan: Apa yang terjadi? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Menurutmu, apa dampak perbuatanmu? Bagaimana sekolah memastikan kejadian ini tidak terulang lagi? Kemudian pada korban ditanyakan: "Apa yang paling sulit buatmu? Apa yang harus kami pastikan agar hal ini tidak terjadi lagi?" Wiwik mencontohkan.

Vina, Perwakilan Sekolah Dasar Swasta (SDS) Sultan Iskandar Muda Medan, juga berbagi cara mengatasi intoleransi. Di sekolah tersebut, diterapkan pendidikan yang mencetak para Pelajar Pancasila dengan nilai religius sebagai nilai nomor satu. "Di sekolah kami, ada Kebaktian Agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Katolik. Selain itu, kami menggelar praktik salat dipimpin langsung oleh peserta didik. Kami mengajarkan anak-anak menjadi imam bagi teman-temannya. Begitu juga anak-anak beragama lainnya, kami biasakan menjadi pemimpin," tutur Vina.

Uniknya, terdapat pohon kerukunan berjenis bisbul (pohon mentega/*velvet apple*) di sekolah. Anak-anak diajarkan bahwa walaupun pohon ini ditanam orang-orang dengan suku, agama, ras, dan status ekonomi berbeda, seluruh oksigen yang dihasilkan

pohon dapat dinikmati dan dihirup siapa saja tanpa membedakan. Di bawah Pohon Kerukunan pun dibangun bangku panjang berwarna-warni. Warga sekolah menyebutnya bangku simbol rumah tawon, karena tawon menghasilkan madu yang menjadi sumber energi bagi semua orang. Filosofinya, setiap warga yang duduk di bangku bersimbol rumah tawon, di bawah keteduhan Pohon Kerukunan, saling menghargai dan menghormati.

Vina juga menguraikan, sekolahnya merawat kebinekaan dengan memfasilitasi perayaan hari besar agama dan kepercayaan untuk setiap peserta didik. SDS Sultan Iskandar Muda membangun semua rumah ibadah di sekolah. Walaupun siswa beragama Hindu sedikit, tapi pura tetap dibangun. Para siswa pun dibiasakan tolong-menolong dan memberi sedekah. "Pada hari-hari besar agama dan kepercayaan, siswa menyisihkan rezeki untuk membeli sembako bagi para siswa yang membutuhkan," tambah Vina.

SDS Sultan Iskandar Muda juga memiliki program inspiratif peningkatan akses pendidikan. Ada program Anak Asuh Silang Berantai yang ditujukan bagi anak-anak kurang mampu dengan punya semangat belajar tinggi. Program ini tidak membedakan latar belakang identitas dan status ekonomi. Jadi siapapun yang ingin ikut diseleksi lewat survei, wawancara, dan observasi untuk menetapkan kelayakan peserta didik sebagai anak asuh. Baru kemudian orang tua asuh memilih calon anak didik yang berbeda suku, agama, dan identitas untuk menghapus prasangka dan stereotip rasial.

Donatur dan anak yang diasuh, dipasangkan bersilang supaya dapat saling mempelajari dan menghormati perbedaan. Harapannya, mantan anak asuh, jika kelak sukses secara ekonomi, diharapkan jadi orang tua asuh. Cerita inspiratif mereka dapat disaksikan seluruhnya pada kanal resmi YouTube Direktorat Sekolah Dasar, dengan judul "Yuk Perangi Perundungan di Sekolah, Ciptakan Sekolah Aman, Nyaman, dan Menyenangkan". (LYD)

Ir. Eddy Satriya M.A

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM



Program SIPLah Mendorong UMKM Meningkatkan Kualitas Usaha

Kemendikbudristek telah meluncurkan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) pada rangkaian program Merdeka Belajar episode ke 12. SIPLah merupakan sistem transaksi elektronik yang terdiri dari beragam penyedia barang dan jasa untuk membantu sekolah dalam berbelanja, terutama belanja yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya, berharap Kemendikbudristek terus melakukan pembaruan dan terobosan berkelanjutan sehingga makin membuat pengguna merasa mudah dan ringkas dalam mengakses SIPLah. Berikut petikan wawancara tim majalah JENDELA dengan Eddy Satriya.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai program SIPLah Kemendikbudristek?

Saya sangat mengapresiasi program ini sebagai salah satu upaya transparansi dalam belanja pengadaan pemerintah. Dengan adanya program ini selain dapat membantu mitra SIPLah dan juga pelaku UMKM dalam meningkatkan pemasaran produknya, SIPLah dapat membantu kesesuaian tata administrasi yang lebih baik pada sekolah-sekolah yang menjadi pengguna dari SIPLah.

Apa yang perlu dioptimalkan agar tujuan program SIPLah dapat terwujud?

Agaknya, dengan adanya upaya penambahan fitur aduan dan pemantauan status transaksi pada program SIPLah telah menjadikan SIPLah sebagai program yang lebih terbuka, mudah dan komunikatif. Namun, agar transparansi tersebut lebih optimal baiknya terdapat pelaporan pencapaian tiap satuan pendidikan yang menggunakan SIPLah yang dikirimkan per-periode sebagai salah satu upaya lain dari SIPLah

mengonfirmasi transaksi apa saja yang telah terselesaikan, sedang dalam proses, dan yang dibatalkan. Laporan pencapaian ini juga bisa dikirimkan kepada mitra SIPLah untuk memantau pencapaian mitra dalam penjualan produknya, sekaligus menjadi evaluasi usaha mitra.

Apa saja yang perlu dilakukan satdik agar dapat memanfaatkan SIPLah dengan baik?

Dengan adanya kebijakan pembelanjaan dana BOS melalui SIPLah, diyakini satdik akan tetap memanfaatkan SIPLah dalam pengadaan barang di sekolah. Namun, agar pemanfaatan SIPLah meningkat, perlu adanya pembaruan dan terobosan yang terus menerus dilakukan oleh Kemendikbudristek agar pengguna merasa semakin mudah dan ringkas dalam mengakses SIPLah. Misalnya dengan membuat aplikasi SIPLah yang dapat diakses melalui *smartphone* yang minimal berfungsi sebagai pemantau *dashboard* pemesanan dan laporan pemesanan yang secara periodik diberikan kepada satdik maupun kepada mitra.

Apa saja tantangan meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM di era digital?

Adapun tantangan UMKM di era digital meliputi kesiapan UMKM pada sisi SDM dan produknya, pemahaman teknologi digital, dan manfaatnya (literasi dan kompetensi digital), kapasitas dan kualitas produksi, penyesuaian model bisnis yang lebih fleksibel termasuk komunikasi bisnis kepada konsumen, selain itu pengambilan keputusan masih terpusat pada pemimpin/pemilik.

Sejauh ini dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, UMKM masih menghadapi kendala lima hal mendasar yakni dari keterbatasan SDM, manajemen usaha, akses dan pemanfaatan teknologi, pembiayaan, serta produksi pemasaran. Kondisi ini menyebabkan keterlibatan sektor UMKM dalam rantai nilai global masih sangat terbatas, UMKM masih belum sepenuhnya terhubung dengan ekosistem digital, dan juga rasio kredit UMKM ke lembaga keuangan masih rendah.

Bagaimana Bapak menilai program SIPLah yang menggandeng UMKM hadir sebagai penyedia barang dan jasa?

Kami sangat mengapresiasi dengan adanya program ini, apalagi program ini juga telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah (LKPP) yang secara massif mengomunikasikan pengadaan barang/jasa oleh UMKM. Ini sejalan dengan semangat PP Nomor 07 tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM, bahwa instansi pemerintahan diamanatkan untuk mengalokasikan 40 persen anggaran pembelanjannya untuk UMKM.

Apakah program SIPLah mampu mendorong kualitas dan produktivitas UMKM?

Tentu saja program ini dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, program ini memberikan motivasi kepada UMKM untuk turut beradaptasi dengan keinginan dan kebutuhan pasar yang cepat, efisien, dan berbasis digital. Kedua, UMKM mendapat akses dan kepastian pasar bagi produk-produknya. Ketiga, UMKM terstimulasi untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produknya.

Bagaimana pengawasan terhadap program SIPLah agar berjalan sesuai ketentuan?

Pengawasan yang dilakukan program SIPLah sekarang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, terbukti dengan diterimanya penghargaan dari KPK. Harapannya, ke depan program SIPLah dapat lebih mudah diakses dan lebih lengkap lagi fitur-fiturnya sehingga bermanfaat bagi UMKM.

Apa saja sinergi-sinergi yang bisa dilakukan UMKM dalam program SIPLah ini?

UMKM dapat menjadi anggota dan/atau bersinergi dengan koperasi untuk memperkuat posisi tawar mereka atau dengan Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) agar produk yang dihasilkan lebih terstandar dan bisa menjawab permintaan dalam jumlah besar.

SIPLah merupakan inovasi mendorong produktivitas dan kualitas UMKM di era digital?

Program SIPLah memang telah menjadi salah satu inovasi di era digital yang patut diapresiasi tinggi. Program SIPLah membuka kanal digital bagi UMKM sehingga makin bertambah UMKM yang terhubung dalam ekosistem digital. Dengan bergabungnya UMKM nantinya pada program ini, diharapkan kualitas dan produktivitas UMKM di era digital juga akan meningkat.

Resensi Buku

Merdeka Belajar dalam Pendekatan Humanis

Indonesia berdiri di atas semangat dan cita-cita kemerdekaan yang telah digaungkan oleh para tokoh pendiri bangsa, salah satunya adalah Ki Hadjar Dewantara yang mencetuskan konsep kemerdekaan dalam belajar dengan pendekatan humanis. Pemikiran tersebut menginspirasi dan mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk merancang sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih transformatif sehingga secara langsung membawa sistem pendidikan ke arah yang lebih baik, kebijakan tersebut bernama “Merdeka Belajar”.

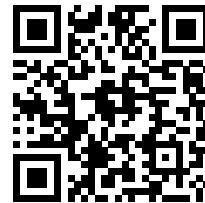
Buku Saku Merdeka Belajar Episode 1-10 Kemendikbudristek merupakan hasil kolaborasi dari pemuda pelajar merdeka (Komunitas Merdeka Belajar yang didukung oleh Kemdikbudristek) yang berlatar belakang alumni penerima beasiswa Bidikmisi. Pemuda pelajar merdeka menuliskan seluruh fase merdeka belajar yang dilakukan oleh Kemendikbudristek di dalam buku saku ini.

Buku Saku Merdeka Belajar ini terdiri dari sepuluh bagian di mana setiap bagian akan menjelaskan tentang Program Merdeka Belajar secara tuntas. Pada episode pertama buku memberikan penjelasan tentang peluncuran empat pokok kebijakan pendidikan. Hingga pada episode 10 muncul pembahasan tentang perluasan program beasiswa LPDP.

Selain itu juga, setiap bagian membahas secara runtut tentang kebijakan apa saja yang ditetapkan hingga hal teknisnya. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh tenaga pendidikan, mahasiswa, hingga pengambil keputusan agar dalam saling berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan selanjutnya guna terwujudnya SDM Unggul dan Indonesia Maju. Supaya buku menjadi lebih menarik dan mudah dipahami pembaca, buku saku juga dilengkapi dengan bagan atau tabel-tabel khusus yang memuat informasi penting lainnya serta penggunaan bahasa yang lugas.

Namun, buku saku ini tak luput dari kekurangan. Buku ini akan menjadi lebih sempurna jika dilengkapi dengan praktik baik implementasi merdeka belajar di satuan pendidikan secara langsung. Penulis juga dapat memasukan kisah sukses penerima manfaat dari program merdeka belajar ke dalam buku.

Informasi selengkapnya, buku dapat diunduh pada tautan <http://repositori.kemdikbud.go.id/23566/> (RWT)



Deskripsi Fisik

Judul	: Merdeka Belajar : Episode 1-10 Kemendikbudristek
Penulis	: Rizal Maula, dkk.
Tahun Terbit	: 2021
Penerbit	: Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka
Halaman	: vii, 122 hlm.
Bahasa	: Indonesia



Pustaka Digital Perpustakaan Kemendikbudristek

TOTAL KOLEKSI

3.354



TOTAL UNDUH

2.772



TOTAL AKSES

2.934



Data per 28 Oktober 2021

Pustaka Digital Perpustakaan Kemendikbudristek merupakan salah satu layanan daring untuk koleksi buku digital *open access* di bidang pendidikan dan kebudayaan. Layanan dapat diakses pada tautan

<https://pustaka-digital.kemdikbud.go.id/slims/index.php>





FOTO: Falcon Pictures

Film Bumi Manusia

Pentingnya Literasi dalam Menjalani Kehidupan di Lingkungan yang Beragam

Bumi Manusia merupakan film yang bercerita tentang seorang pribumi yang ingin hidup bebas di zaman Hindia-Belanda. Pribumi tersebut bernama Raden Mas Tirto atau yang biasa disapa Minke. Dalam film yang disutradarai Hanung Bramantyo ini diceritakan bahwa Minke bersekolah di Hindia Belanda School (HBS), sekolah yang hanya diperuntukkan bagi anak anak keturunan Eropa murni, Indo-Eropa, serta anak anak dari para pejabat di zaman itu.

Peran Minke yang dimainkan oleh Iqbaal Ramadhan ini merupakan siswa HBS yang juga seorang penulis dengan inisial Max Tolerance. Di HBS, Minke berteman dengan Suurhof, siswa keturunan Indo-Eropa. Dalam pergaulannya di sekolah, Minke terbiasa dikucilkan karena status sosialnya yang dipandang rendah. Dalam sebuah kesempatan, saat menemani Suurhof ke rumah temannya, ia bertemu dengan Annellise, putri seorang keturunan Eropa yang berhubungan dengan wanita pribumi. Annellise diperankan oleh Mawar Eva de Jongh.

Hubungan Minke dan Annallise yang awalnya hanya perkenalan biasa berlanjut menjadi benih-benih cinta. Namun karena perbedaan status sosial, hubungan keduanya penuh dengan tantangan yang



FOTO :Falcon Pictures



FOTO :Falcon Pictures



FOTO :Falcon Pictures

tidak hanya membuat keduanya sulit untuk bersama, tapi berpengaruh pada keluarga. Naskah film yang ditulis oleh Salman Aristo ini menggambarkan bagaimana nasib serupa sebelumnya juga dialami oleh Nyai Ontosoroh, ibunda Annalisse, yang seorang pribumi harus hidup dengan keturunan Belanda, bahkan tanpa status pernikahan. Akibatnya, ia kerap dipanggil gundik.

Dari sisi budaya, film *Bumi Manusia* menggambarkan bagaimana Nyai Ontosoroh dan Minke berusaha mempertahankan budaya aslinya, yaitu Jawa, walaupun kehidupan kesehariannya lekat dengan para keturunan Eropa. Hal lain, film ini juga memperlihatkan kuatnya tekad orang Indonesia untuk tetap menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada tanah kelahiran.

Film yang tayang pada 2019 silam ini juga menceritakan perjuangan Minke dalam memperjuangkan hak kaumnya agar bisa bebas dari jeratan Belanda. Dampaknya, budaya Jawa pada masa itu tidak luntur. Kebudayaan Indonesia juga

ditampilkan dari pakaian yang dikenakan para keturunan Indo-Eropa yang sangat mencintai budaya Indonesia, dengan memakai kebaya khas Jawa.

Dari sudut pandang pendidikan, film ini menggambarkan secara lugas bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Pada zaman itu, pendidikan sangat sulit didapatkan dan hanya orang-orang dari kalangan tertentu saja yang bisa mengenyamnya. Pesan yang disampaikan dari film ini adalah, dengan pendidikan, seseorang dapat berkomunikasi dengan baik dan literasi meningkat. Pendidikan dan literasi dapat membuat seseorang yang status sosialnya dianggap kelas bawah, bisa setara dengan kelas di atasnya. Orang yang berpendidikan memiliki jangkauan informasi yang lebih luas.

Dari film ini terlihat bahwa Minke mampu menyelesaikan masalah-masalahnya karena ia kritis dan pandai berkomunikasi. Minke yang gemar membaca dan pandai mencari informasi, mampu melewati tantangan baik dalam pergaulan maupun perjalanan cintanya. Hal ini terlihat ketika Minke akhirnya dapat menikah dengan Annalisse, walaupun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena Annalisse terpaksa pergi ke Belanda untuk tinggal bersama keluarga ayahnya.

Pelajaran yang didapat dari film yang berlatar zaman Belanda ini masih relevan untuk diadaptasi di zaman sekarang, terutama pentingnya membaca dan mengutamakan pendidikan tanpa harus kehilangan akar budaya. (AWF)



BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

kemdikbud.go.id

Tolak Gratifikasi

**JIKA TERPAKSA MENERIMA
LAPORKAN!**



ZI-WBK

**KEMENDIKBUD
BERSIH**



FOTO: BKHM

Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) 2021

Perkuat Ekosistem Musik Tradisi dan Regenerasi Pelestari Budaya

Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) 2021 sebagai upaya memperkuat ekosistem musik tradisi Indonesia dan regenerasi pelestari budaya. Tahun ini perhelatan FMTI difokuskan di tiga lokasi yang di antaranya menjadi Destinasi Super Prioritas sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. FMTI 2021 digelar di tiga tempat, yaitu Danau Toba, Labuan Bajo, dan Tidore, dengan mengangkat tema “Musik Sakral”. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim berkesempatan hadir secara langsung dalam puncak pertunjukan FMTI Danau Toba pada 26 Oktober 2021.



Penyelenggaraan Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) 2021 berkolaborasi dengan musisi tradisi dan penggiat budaya lokal. Kegiatan ini menjadi wujud hadirnya Kemendikbudristek dalam mengembangkan ekosistem musik tradisi dan membangun kecintaan generasi muda terhadap identitas budayanya. Semangat para penggiat

musik tradisi dalam memajukan musik tradisi di daerahnya masing-masing akan mendukung upaya pemajuan kebudayaan Indonesia sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Rangkaian FMTI 2021 diawali di Danau Toba yang dimulai pada 21 Agustus 2021 dengan membuka pendaftaran bagi para komposer melalui sistem *open*

Selain untuk melindungi dan mengembangkan kesenian tradisional, dukungan untuk musik tradisi juga diharapkan dapat membangun narasi budaya dan turisme bagi destinasi prioritas Indonesia.



FOTO: BKHM

call. Dari hasil kurasi, terpilih 12 komposer untuk mengikuti rangkaian Festival Musik Tradisional Danau Toba 2021. Selanjutnya ke-12 komposer tersebut berdiskusi dengan kurator mengenai bahan referensi awal musik sakral di Danau Toba. Setelah dilakukan riset dan diskusi kelompok terpumpun, para komposer dan kurator memulai proses penciptaan karya dan perekaman video. Pada pertengahan Oktober 2021, mereka menghasilkan 12 video musik untuk Festival Musik Tradisional Danau Toba 2021 yang pembuatannya dilaksanakan di 12 Geosite Toba Caldera UNESCO Global Geoparks. Aktualisasi karya ke-12 komposer tersebut dikemas dalam bentuk klip video, festival daring, serta perekaman lagu untuk kemudian ditayangkan di platform digital, seperti Spotify dan Joox.

Sementara itu, rangkaian FMTI 2021 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), berlangsung pada 19 Oktober 2021 hingga 14 November 2021. FMTI di Labuan Bajo dimulai dengan tahap pemilihan 10 komposer musik NTT terbaik yang karyanya juga akan diaransemen dan direkam dalam bentuk video dokumenter dan lagu. Ke-10 komposer musik NTT tersebut juga akan mengikuti seminar dan festival musik “Pesta Bunyi Flabomora”. Terakhir, perhelatan FMTI di Pulau Tidore mulai dilaksanakan pada November 2021 dalam bentuk pertunjukan musik tradisi di empat kesultanan Maluku Utara yang juga akan diabadikan dalam rekaman.

Meski digelar di tiga tempat berbeda, FMTI tetap menjadi simfoni yang meramaikan semangat musik tradisi Indonesia. Selain untuk melindungi dan mengembangkan kesenian tradisional, dukungan untuk musik tradisi juga diharapkan dapat membangun narasi budaya dan turisme bagi destinasi prioritas Indonesia.

Di Danau Toba, FMTI 2021 diselenggarakan

Kemendikbudristek bekerja sama dengan Rumah Karya Indonesia. Festival Musik Tradisional Danau Toba 2021 dibagi menjadi tiga kegiatan, yaitu Karya Kolaborasi “Eta Margondang”, Kolaborasi Karya Bersama Pemusik Tradisi di Danau Toba (Maestro Empat Puak), dan Malam Puncak FMTI Danau Toba.

Malam Puncak Festival Musik Tradisional Danau Toba 2021 dihadiri oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, di SMP Negeri 1 Harijan, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, pada 26 Oktober 2021. Diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, Puncak Festival Musik Tradisional Danau Toba 2021 berlangsung meriah dengan berlatar belakang pemandangan Danau Toba serta alunan musik tradisional Toba yang khas.

Festival menampilkan pertunjukan komposisi musik tradisional bersama maestro se-kawasan Danau Toba dan pertunjukan “Eta Margondang” oleh 60 anak-anak. Sepasang remaja pemain musik “Eta Margondang” sempat memberikan cinderamata seruling kepada Mendikbudristek dan mengajaknya menyanyikan nyanyian tradisional dari Danau Toba, yakni “Sinanggar Tulo” sambil menari bersama-sama.

Festival Musik Tradisional Danau Toba 2021 fokus pada isu “alih generasi” sebagai upaya pelestarian budaya. Pesan yang penting dari kegiatan ini adalah alih generasi sehingga ada regenerasi musik tradisi. Kegiatan ini diharapkan bisa menanamkan semangat baru di kalangan generasi muda untuk mengenal musik tradisi Indonesia sehingga generasi muda bisa memegang peran yang besar dalam menentukan arah pemajuan kebudayaan ke depan. Kolaborasi antargenerasi dalam Festival Musik Tradisional Danau Toba juga menjadi salah satu upaya pemajuan kebudayaan yang penting untuk dijaga keberlanjutannya. **(DES)**



FOTO: its.ac.id

Gelombang Inovasi di Kampus Perjuangan Melawan Covid-19

Mencegah Penularan Hingga Deteksi Awal Melalui Keringat di Ketiak

Kehadiran pandemi Covid-19 tak selalu dipandang sebagai energi negatif yang menyelimuti negeri ini. Di tengah keputusan untuk hidup berdampingan dengan virus yang telah merenggut jutaan nyawa tersebut, semangat untuk kembali ke kehidupan normal terus bergulir melalui inovasi-inovasi yang ditorehkan. Setidaknya begitulah cara Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.



Sejak mulai dikembangkan pada Juli 2020 silam, ITS akhirnya meluncurkan CoFilm+, sebuah produk pelapis yang mampu membunuh 99,9 persen virus hanya dalam waktu satu jam. Produk yang diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa lintas jurusan dan kampus ini disebut dapat mematikan virus dengan cepat di tempat-tempat yang sering disentuh.

CoFilm+ dikemas dalam bentuk cat dan stiker, di mana salah satu material penyusunnya adalah *nano copper* dan *silver* yang mampu membunuh virus. Penggunaan CoFilm+ terbilang cukup mudah, hanya dengan melapiskan produk

tersebut ke media yang sering disentuh, seperti gagang pintu, *railing* tangga, meja, dan sebagainya. Setelah dipasang, lapisan tersebut akan mematikan virus pada permukaan media-media tersebut yang ditransfer lewat sentuhan.

Dosen Teknik Material dan Metalurgi ITS, Agung Purniawan, selaku dosen pembimbing, menyebutkan kelebihan CoFilm+ dibandingkan dengan menyemprotkan cairan desinfektan. CoFilm+ memiliki masa aktif yang lebih lama serta perawatannya yang mudah. Alat ini, dinilai lebih efisien dalam menghadapi Covid-19.



FOTO: its.ac.id

“Penggunaannya lebih efisien karena untuk perawatannya sendiri, cukup dibersihkan secara berkala, bisa dengan air seperti biasa,” tutur Agung.

Dalam pengujian yang dilakukan di *Institute of Tropical Disease (ITD) Unair*, alat ini mampu membunuh 90 persen virus Sars Cov-2 dalam waktu 10 menit dan dalam 1 jam meningkat hingga berhasil membunuh 99,9 persen virus. Jika dibandingkan dengan media yang tidak dilapisi CoFilm+, waktu yang dibutuhkan adalah lebih dari 24 jam bagi virus untuk bisa bertahan.

Mendeteksi virus lewat bau ketiak

Selain CoFilm+ yang bisa membunuh virus Sars Cov-2 penyebab Covid-19, ITS juga mengembangkan produk i-nose c-19, sebuah inovasi yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang sedang terjangkit virus atau tidak hanya dengan mencium bau ketiak. Sebelumnya, tes usap antigen maupun *Polymerase Chain Reaction (PCR)* menjadi beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus tersebut di tubuh seseorang.

Alat yang diinisiasi di awal 2021 ini dikembangkan oleh mahasiswa jengang magister dan doktoral ITS. Pendeteksi virus yang berbasis kecerdasan buatan dengan tingkat akurasi mencapai 90 persen tersebut menjadi metode pertama di dunia yang

mendeteksi virus melalui bau ketiak. Bagian tubuh ini dipilih sebagai tempat deteksi karena ketiak merupakan salah satu bagian tubuh yang memiliki banyak kelenjar keringat, sehingga membuat proses pengambilan sampel akan lebih mudah.

Guru Besar ITS, Riyanarto Sarno, menjelaskan kemudahan cara kerja i-nose c-19 yang dapat mendeteksi virus hanya dengan mengapit sensor pada ketiak. Kemudian sensor tersebut akan menangkap bau yang selanjutnya dianalisis oleh kecerdasan buatan. Hasilnya pun akan muncul langsung di alat yang sama. Dalam satu alat sudah bisa menangkap, memproses, dan menampilkan hasil. Bahkan, perekaman data pun berlangsung di alat yang sama. Dengan menempel KTP elektronik, data akan dibaca langsung melalui perantara *Near Field Communication (NFC)* dan diunggah ke basis data di jaringan internet.

Alat i-nose c-19 sempat diimplementasikan saat memeriksa panitia kegiatan *Ini Lho ITS! (ILITS) 2021*. Sedangkan untuk penggunaan yang lebih luas, masih menunggu izin dari Kementerian Kesehatan. Saat ini, alat pendeteksi tersebut masih dalam tahap uji klinis di Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan izin edar.

Ke depan, kehadiran i-nose c-19 dapat menjadi alternatif cara mendeteksi keberadaan orang yang terjangkit virus Covid-19. Tujuannya tak lain, alat ini diharapkan dapat turut mencegah penyebaran virus.

Inovasi lain

Sejak awal pandemi, ITS yang sering disebut sebagai kampus perjuangan ini sudah mulai berinovasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah kolaborasi bersama Universitas Airlangga (Unair) yang meluncurkan *Robot Medical Assistant ITS – Airlangga (RAISA)* pada April 2020. Sesuai namanya, robot ini bertugas membantu pelayanan pasien yang terjangkit Covid-19 dan juga mengurangi kontak fisik antara pasien dan tenaga medis, mengingat saat itu jumlah Alat Pelindung Diri (APD) sangat terbatas.

Robot yang memiliki gabungan teknologi dari empat robot produksi ITS sebelumnya ini, dikembangkan oleh tim robot ITS dan tenaga medis dari Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) untuk mengembangkan fitur sesuai kebutuhan pasien. Dengan koneksi melalui *Wireless Fidelity (WiFi)*, RAISA dikendalikan melalui jarak jauh menggunakan *joystick* dan dapat digunakan untuk berkomunikasi antara pasien dengan petugas medis. **(SPA)**



FOTO: BKHM

BOP PAUD

Meringankan Biaya untuk Layanan PAUD Lebih Bermutu

Keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini semakin banyak diminati oleh masyarakat. Indikasinya adalah terdapat penambahan jumlah PAUD dan jumlah siswa setiap tahun. Tren peningkatan jumlah PAUD menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Melalui PAUD, anak-anak diberi rangsangan motorik agar dapat berkembang dengan baik sesuai perkembangan usia.

Banyaknya jumlah PAUD yang didirikan oleh masyarakat, secara signifikan membantu pemerintah meningkatkan akses pada pendidikan anak usia dini. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudiyono dan Yunita Murdiyningrum, pada 2019, diketahui bahwa di balik menjamurnya keberadaan PAUD saat ini, belum ada standar pelayanan minimal yang perlu diusahakan terus menerus.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tersebut mengulas bagaimana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi PAUD dapat memperluas akses agar lebih banyak anak

yang bisa mendapatkan pendidikan sejak dini. Usia 0-6 tahun adalah masa emas (*the golden age*) dalam tumbuhkembang seorang anak.

Pemerintah menggelontorkan BOP tujuannya tak lain untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar dapat memperoleh layanan PAUD yang bermutu. Program BOP ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. Penelitian ini, mengevaluasi efektivitas BOP PAUD yang berhubungan dengan ketepatan waktu penerimaan, pemanfaatan dana, dampak BOP dalam penyelenggaraan PAUD, dan kontribusi BOP dalam biaya penyelenggaraan PAUD.





Tahun 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,47 triliun untuk BOP PAUD. Jumlah tersebut naik 10 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah Rp4,07 triliun. Peningkatan anggaran BOP PAUD tahun 2019 juga disertai dengan perubahan mekanisme penyaluran dana. Jika pada tahun 2018 menggunakan satu tahap penyaluran, pada tahun 2019 menggunakan dua tahap penyaluran. Harapannya, dengan perubahan mekanisme menjadi dua tahap, penyaluran BOP PAUD jadi lebih baik.

Realitanya, penelitian ini menemukan bahwa pencairan dana BOP PAUD tahun 2019 di 12 wilayah sampel secara umum tidak tepat waktu dan terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain akurasi data siswa tidak sesuai, yaitu antara data saat pengajuan dengan data pada masa pencairan dana, proses administrasi dan birokrasi di daerah yang memerlukan banyak pengesahan, pergantian pejabat di daerah, dan peraturan daerah terkait dengan dana hibah.

Penelitian juga mengungkapkan pemanfaatan dana BOP PAUD, secara umum baik di Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), maupun Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS), belum sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Pada juknis BOP PAUD tahun 2019 disebutkan dana BOP untuk kegiatan pembelajaran dan bermain minimal 50 persen, kegiatan pendukung maksimal 35 persen, dan kegiatan lainnya maksimal 15 persen. Di TK, KB, dan SPS, ada ketidaksesuaian yang terjadi yang dikarenakan pembiayaan yang paling besar sebetulnya untuk komponen honor guru, dan belum tercakup dalam juknis. Sedangkan pada TPA dikarenakan pada juknis penggunaan sangat mengikat dan bentuknya seragam, sedangkan kebutuhan satuan PAUD pada masing-masing lembaga berbeda.

Secara umum, besaran dana yang diterima oleh Lembaga PAUD disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada dikali dengan Rp600.000. Jika ada perbedaan jumlah peserta didik yang terekam di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan jumlah riil di satuan pendidikan, maka data yang dipakai adalah Dapodik. Ketidaksesuaian tersebut bisa jadi disebabkan oleh data di Dapodik belum diperbarui sesuai dengan data sebenarnya saat tanggal *cut off*. Selisih penghitungan dana akibat perbedaan data ini umumnya tidak banyak, hanya dua sampai tiga siswa saja, sehingga tidak berpengaruh

Pemerintah menggelontorkan BOP tujuannya tak lain untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar dapat memperoleh layanan PAUD yang bermutu. Program BOP ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus

terhadap kegiatan pembelajaran, karena masih dapat ditutupi dengan subsidi silang dari sumber dana lainnya, terutama dari iuran bulanan dari orang tua siswa.

Meskipun terdapat temuan yang menyebut penyaluran dana BOP untuk PAUD belum optimal dan masih menemui kendala, namun secara tidak langsung dana ini efektif dalam membantu meningkatkan mutu pembelajaran. Indikasinya adalah melalui dana BOP satuan PAUD yang semula kekurangan sarana pembelajaran dapat terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan sarana dalam penyelenggaraan pembelajaran berpengaruh terhadap situasi pembelajaran dan memotivasi guru dan anak dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, satuan PAUD yang semula tidak mempunyai alat permainan edukatif (APE) sebagai sarana bermain dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil survei, bantuan dana BOP cukup efektif dalam membantu menutupi kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan PAUD. Kontribusi BOP dalam penyelenggaraan PAUD untuk TK rata-rata sebesar 33 persen dari seluruh penyelenggaraan, KB 59 persen, SPS 56 persen, dan TPA 29 persen.

Dengan manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOP PAUD, ke depan, perlu dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan PAUD dalam rangka sinkronisasi data. Selain itu, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan BOP PAUD yang mudah dipahami dan fleksibel dalam penggunaan terkait dengan besaran proporsi komponen penggunaan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan PAUD, karena kebutuhan dana pada satuan PAUD cukup beragam. (ANK)

Sumber: Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Volume 13, Nomor 1/2020. **Judul:** Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2019. **Penulis:** Sudiyono dan Yunita Murdiyningrum – Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud.

Semarak Bulan Bahasa dan Sastra 2021

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), menyelenggarakan berbagai kegiatan sebulan penuh menyemarakkan peringatan bulan Bahasa dan sastra (BBS). Acara dan kegiatan tersebut dikemas secara kreatif dan inovatif untuk menghasilkan semangat baru dalam berbahasa, seperti festival, penilaian karya, pemilihan duta bahasa, gelar wicara serta penghargaan kebahasaan dan kesastraan.

Beragam kegiatan yang dilakukan menjadi upaya untuk meningkatkan kecintaan seluruh komponen bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Meskipun masih di masa

pandemi Covid-19, kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat.

Pada acara Puncak BBS, Kamis (28/10), Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, mengajak pemuda Indonesia untuk terus menyalakan semangat untuk mencintai dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Sementara itu, Kepala Badan Bahasa, E. Aminuddin Aziz, meyakini tekad kuat generasi muda dalam menjaga bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang.

Berikut beberapa pemenang lomba, festival, dan pemilihan karya terbaik yang diumumkan pada Puncak Bulan Bahasa dan Sastra 2021.

Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tingkat Nasional Tahun 2021

Terbaik I: SMA Negeri 7 Pinrang (Sulawesi Selatan)

Terbaik II: MAN Model 1 Manado (Sulawesi Utara)

Terbaik III: SMA Frater Don Bosco (Kalimantan Selatan)

Duta Bahasa Nasional 2021

Terbaik I: Irfan Taofik dan Florie Aurantia (Jawa Barat)

Terbaik II: Abdillah El Habib dan Veronica (Banten)

Terbaik III: Sandy Ramadhan dan Winney Amiani (Kalimantan Tengah)

Debat Bahasa Antarmahasiswa Se-Indonesia

Terbaik I: Universitas Gadjah Mada

Terbaik II: Universitas Negeri Jakarta

Terbaik III: Universitas Sebelas Maret dan Universitas Tanjungpura

Festival Digital Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional Tahun 2021

Terbaik I: SMAN 1 Kendari (Sulawesi Tenggara)

Terbaik II: SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe (Sumatra Utara)

Terbaik III: SMA Labschool Kebayoran (DKI Jakarta)

Lomba Mendongeng bagi Penyandang Disabilitas Netra Tahun 2021

Terbaik I: Rivanly Rachmad Wicaksono (SMP Negeri 182 Jakarta)

Terbaik II: Titin Khoeriyah (SLB Negeri Tamanwinangun)

Terbaik III: Muhammad Wiratama Priswanto (SLB Negeri 1 Tanjungpinang)

Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tingkat Nasional Tahun 2021

Tingkat SMA

Juara I: Buzzy Wizzy Studio (Asal Mulani Tao Toba)

Juara II: Anya Uniqua (Legenda Putri Mandalika)

Juara III: Dado Animation (Asal Usul Air Tiga Rasa Rejenu)

Tingkat Mahasiswa/Umum

Juara I: Asterix Animation (Bunda Sejati)

Juara II: Syamsul Bahri (Dedap Durhaka)

Juara III: GWS Animasi (Penakluk Rajawali)

Festival Handai Indonesia Tahun 2021

Kategori Bercerita:

Terbaik I: Esra Syarif Elsayed Ibrahim Nassar (Mesir)

Terbaik II: Rokayah Luebaesa (Thailand)

Terbaik III: Raed M.H. Arada (Palestina)

Kategori Berpidato:

Terbaik I: Aya Mohamed Khalil (Mesir)

Terbaik II: Musbahu Adam Ahmad (Nigeria)

Terbaik III: Dipesh Raj (India)

Kategori Membawakan Reportase

Terbaik I: Fatimah Gamal (Mesir)

Terbaik II: Ho Ngoc Hieu (Vietnam)

Terbaik III: Lee Semi (Korea Selatan)

Kategori Bermusikalisasi Puisi:

Peraih Penghargaan Kategori A: Aleksandra Dapkova (Bulgaria)

Peraih Penghargaan Kategori C: Deidre R. Morales (Filipina)

Peraih Penghargaan Kategori E: Annelene Lammers (Belanda)

Kategori Bermusikalisasi Puisi:

Peraih Penghargaan Kategori B: Mohammed Ali (Mesir)

Peraih Penghargaan Kategori E: Mariam Ashraf (Mesir)

Kata Baku dan Tidak Baku

Manakah yang baku, asas atau azas? Jawaban yang benar adalah asas karena diserap dari bahasa Arab, asas (اساساً). Huruf “sin” (س) dalam bahasa Indonesia berubah menjadi huruf “s”, kata lainnya yang serupa, yaitu saat dan salam.

Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia.

Sedangkan, kata tidak baku itu sebaliknya, yaitu kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Saat ini, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan acuan yang berisi kaidah kebahasaan bagi penutur bahasa Indonesia dalam pemakaian bahasa tulis dengan baik dan benar. **(ANW)**

No.	Kata Baku	Kata Tidak Baku
1.	Atlet	Atlit
2.	Asas	Azas
3.	Blangko	Blanko
4.	Detail	Detil
5.	Diagnosis	Diagnosa
6.	Efektivitas	Efektifitas
7.	Elite	Elit
8.	Ekstra	Extra
9.	Faksimile	Faksimili
10.	Formal	Formil

Jadi, setelah memahami mengenai kata baku dan tidak baku, ayo biasakan menggunakan selalu kata baku, baik dalam komunikasi lisan dan tulisan. **(ANW)**



INFORMASI KONTAK

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tetap melayani permohonan informasi dan layanan kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Saluran ULT Kemendikbudristek yang dapat diakses:

Pusat Panggilan

177

Posel

pengaduan@kemdikbud.go.id

Portal

kemdikbud.lapor.go.id

Portal

ult.kemdikbud.go.id





Selamat



**Hari Guru
Nasional
2021**

BERGERAK DENGAN HATI, PULIHKAN PENDIDIKAN



ISSN: 2502-7867



9 772502 786065